



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 08119920254 Whatsapp 081902222210

Laman: banten.kemenkumham.go.id, surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

Nomor : W.12.PR.03 – 10

15 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2024 Kantor Wilayah Banten

Yth. Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum
di tempat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Wilayah Banten.

Demikian yang dapat kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
R. Natanegara K.P

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN



Banten Prestasi, PASTI Jawara

KEMENKUMHAM
CORPORATE UNIVERSITY

KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. KH. SYAM'UN NO. 44 D SERANG

e.gov

LKJIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Tahun 2024

☎ 081 199 202 54

🌐 banten.kemenkum.go.id

✉ kanwil.banten@kemenkum.go.id

📍 Jl. Brigjen KH. Sam'un No. 44 Serang

KATA PENGANTAR



Tahun 2024 ini merupakan tahun penghujung dari periode Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Selama periode 5 tahun tersebut, Kantor Wilayah Banten secara konsisten telah menghasilkan kinerja positif dengan memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang mampu berdampak positif kepada Masyarakat khususnya di Wilayah Banten. Hasil pencapaian kinerja tersebut tentu tidaklah mudah karena dalam prosesnya dibutuhkan manajemen secara terstruktur mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan perbaikan secara terus-menerus untuk menunjang keberhasilan *core bisnis* Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Banten.

Proses manajemen terstruktur tersebut menjadi fokus utama guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang berkualitas dilingkungan Kantor Wilayah Banten yang kemudian direpresentasikan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Banten. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai.

Sistematika penyusunan LKjIP Tahun 2024 Kantor Wilayah Banten mengacu kepada hasil pengukuran indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil terhadap capaian kinerja tersebut, diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi masyarakat dan *stakeholder* serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Banten dimasa mendatang.

Serang, 31 Desember 2024

Kepala Kantor Wilayah Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Natanegara Kartika Purnama



DAFTAR ISI

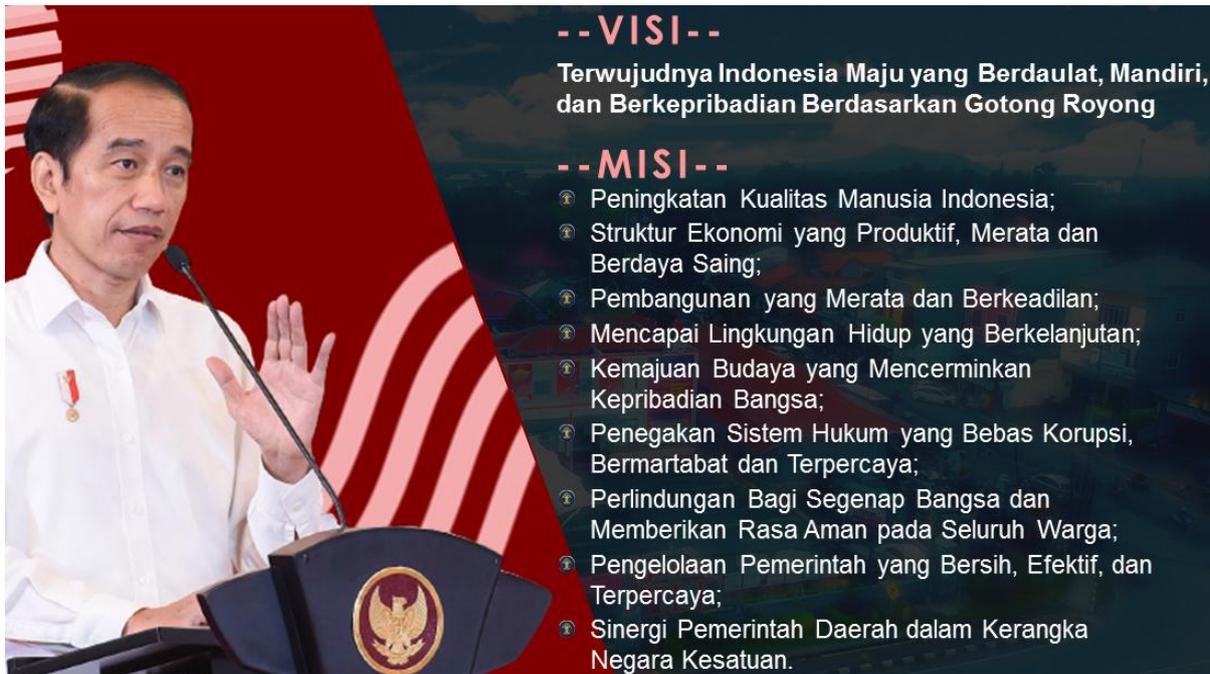
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
Maksud dan Tujuan	8
Aspek Strategis	8
Isu Strategis	9
Sistematika Penyajian Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Rencana Strategis	12
Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
Capaian Kinerja Organisasi	30
Kantor Wilayah Banten	30
Divisi Administrasi – Dukungan Manajemen	31
Divisi Yankum - Administrasi Hukum Umum	40
Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual	45
Divisi Yankum - Peraturan Perundang-undangan	51
Divisi Yankum - Badan Pembinaan Hukum Nasional	55
Divisi Yankum - Hak Asasi Manusia	67
Divisi Yankum - Badan Strategi Kebijakan	79
Divisi Keimigrasian	82
Divisi Pemasyarakatan	94
Realisasi Anggaran	109
Capaian Kinerja Anggaran	112
Capaian Kinerja Lainnya	114
BAB IV PENUTUP	133
Kesimpulan	134
Saran	135

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Banten Tahun 2024

EXECUTIVE SUMMARY

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Kantor Wilayah Banten mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



-- VISI --
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong

-- MISI --

- ① Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- ① Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
- ① Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- ① Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- ① Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- ① Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- ① Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- ① Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- ① Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Misi Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8 yang kemudian diterjemahkan kedalam 2 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Penegakan dan Kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

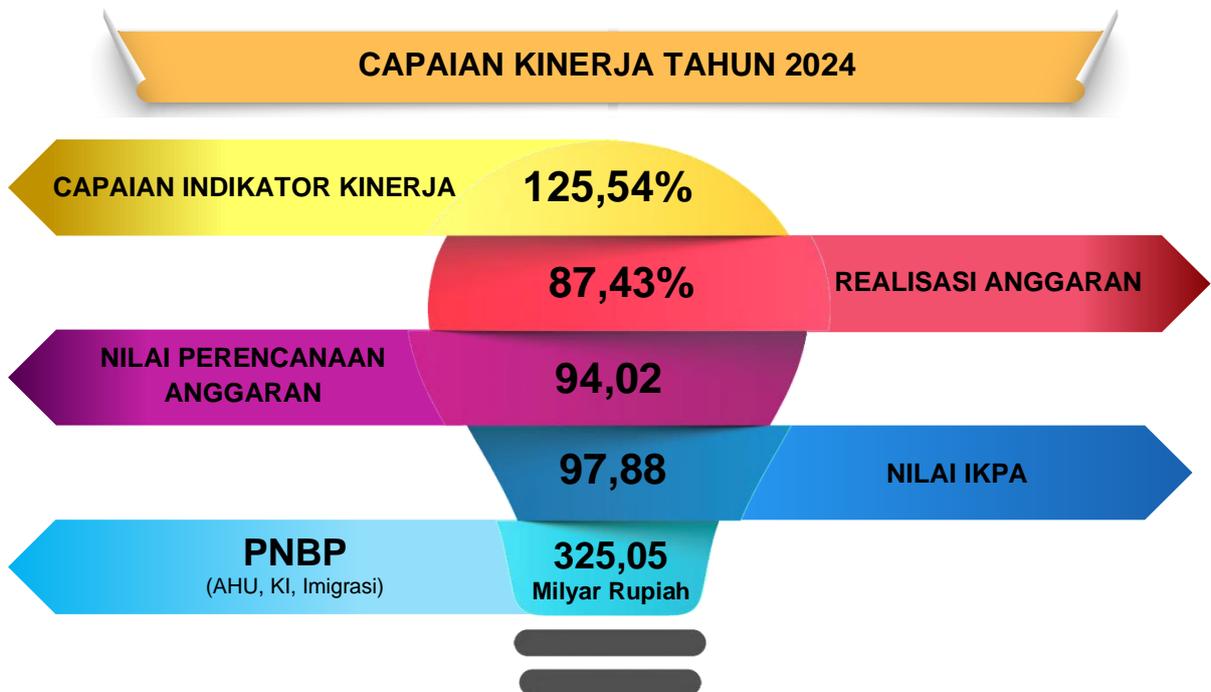
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Banten mengemban 4 program yang terbagi dalam 12 Kegiatan yaitu :

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Program Dukungan Manajemen
<p style="text-align: center;">Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum 2. Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah 3. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah 4. Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah 5. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 	<p style="text-align: center;">Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2. Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah 3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan 4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Imigrasi
Program Pembentukan Regulasi	Program Pemajuan dan Penegakan HAM
<p style="text-align: center;">Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah 2. Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah 	<p style="text-align: center;">Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah

Berdasarkan Program dan Kegiatan tersebut, telah ditetapkan 30 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja Kantor Wilayah Banten di tahun 2024 yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah Banten. Berdasarkan hasil pengukuran dari total 30 target indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan sangat baik melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan hasil rata-rata capaian seluruh indikator kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 125,54%.

Pada sisi anggaran, realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten belum tercapai optimal dengan realisasi sebesar 87,43%. Hal ini dikarenakan terdapat kebijakan Auto Adjustment (Blokir) anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor pada Kantor Imigrasi Serang yaitu sebesar Rp 50.888.054.000,- atau sebesar 11,96% dari total anggaran Kantor Wilayah Banten tahun 2024. Selanjutnya untuk nilai kinerja anggaran Kantor Wilayah Banten berdasarkan pengukuran nilai Perencanaan Anggaran (bobot 50%) dan nilai IKPA (bobot 50%) telah tercapai optimal dengan nilai sebesar 95,95.

Sedangkan pada tahun 2024, total kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Wilayah Banten yang bersumber dari PNBP Administrasi Hukum Umum, PNBP Kekayaan Intelektual, dan PNBP Imigrasi yaitu sebesar Rp 325.048.725.000,-.



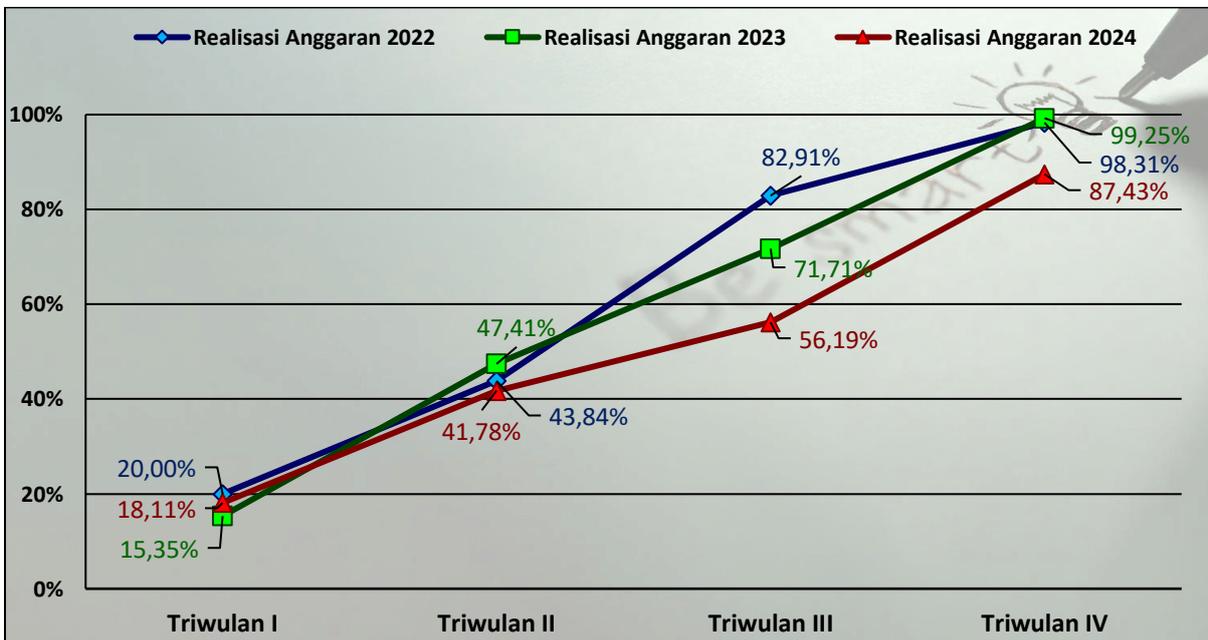
CAPAIAN KINERJA YEAR ON YEAR KANWIL BANTEN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (YoY)



Berdasarkan data capaian kinerja secara *year on year* (YoY), capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten pada periode tahun 2024 mencapai 125,54% atau meningkat sebesar 10,39% dibanding capaian tahun 2023 yaitu sebesar 115,16%. Hal ini menunjukkan progress positif atas pencapaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten di tahun 2024.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (YoY)



Sedangkan pada sisi anggaran, realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada tahun 2024 mencapai 87,43% atau mengalami koreksi sebesar -11,82% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 99,25%. Koreksi capaian pada tahun 2024 tersebut dikarenakan terdapat anggaran belanja modal yang diblokir (Auto Adjustment) sehingga tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 50.888.054.000,- atau sebesar 11,96% dari total keseluruhan anggaran Kantor Wilayah Banten.

Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Banten telah mewujudkan inovasi-inovasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan publik. Inovasi yang dihasilkan tersebut merupakan prestasi bagi Kantor Wilayah Banten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis terkait Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Inovasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai berikut:

INOVASI KANTOR WILAYAH BANTEN

<p>JAWARA New Version</p> 	<p>TEROBOSAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Jawaara mengintegrasikan seluruh Pelayanan Hukum dan HAM yang dapat diakses kapan pun & dimanapun sehingga Masyarakat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi & pelayanan Hukum dan HAM ❖ Manfaat Aplikasi JAWARA menutup celah Korupsi , Pungli , dan Gratifikasi
<p>M-HUKDIS</p> 	<p>TEROBOSAN PEMBINAAN HUKUMAN DISIPLIN</p> <p>M-Hukdis pada Aplikasi Sikap Jawaara merupakan media digitalisasi pelaksanaan Pembinaan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sehingga evaluasi dan monitoring proses pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilakukan secara optimal</p>
<p>POSKO BANGKUMIS</p> 	<p>TEROBOSAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM</p> <p>Pos Konsultasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin/ tidak mampu merupakan program yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah Banten bersama Pemerintah Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum sehingga akses terhadap keadilan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat</p>
<p>SIGUBOOK</p> 	<p>TEROBOSAN PENCATATAN TAMU</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mempermudah pengunjung dalam mengisi daftar tamu ❖ Mempermudah dalam pengumpulan dan penyortiran data pengunjung ❖ Membantu mengetahui jenis layanan yang sering dikunjungi

FACE SMART ACCESS LOCK



TEROBOSAN KEAMANAN AKSES PINTU MASUK

Kunci pintar otomatis berbasis sistem yang dapat merekam seseorang saat membuka atau mengunci pintu dengan deteksi wajah sehingga dapat meningkatkan keamanan dan berperan dalam monitoring disiplin pegawai serta sterilisasi ruangan dari pihak asing.

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Banten pada tahun 2024 ini sejalan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih di Lingkungan Kantor Wilayah Banten selama tahun 2024 diantaranya :

1. Penghargaan dari KPPN Serang sebagai Terbaik Pertama Kategori IKPA Tahun 2023 pada DIPA Dijten Imigrasi dengan nilai 100 & Terbaik ketiga Kategori IKPA Tahun 2023 pada DIPA Ditjen HAM dengan nilai 99,79
2. Penghargaan dari Bapenda Kab. Tangerang yaitu Pak Jaka Digital Award Kategori Mitra Strategis
3. Penghargaan dari BNNP Provinsi Banten sebagai Partisipasi Aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
4. Penghargaan dari Pemda Kab. Pandeglang atas Gerai Terbaik dengan Kategori Pengunjung dan Pelayanan Terbanyak pada Mall Pelayanan Publik Kab. Pandeglang.



5. Penghargaan dari BPSDM sebagai Insan Cerdas BPSDM Hukum dan HAM Kategori Unit Kerja Terbaik dalam Pemenuhan Hak Jam Pembelajaran dengan Metode Mandiri



6. Penghargaan dari BSK Kementerian Hukum sebagai Kantor Wilayah Terbaik pada Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024



7. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten atas Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dengan Nilai 94,33



8. Penghargaan dari Ditjen AHU sebagai Kantor Wilayah Terbaik 2 Kategori Persentase Pertumbuhan Pencapaian Target dan Realisasi PNPB Tahun 2022 - 2024



9. Penghargaan dari Ditjen AHU sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam Kategori Nilai IKPA dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan Tahun 2024



10. Peringkat Pertama Satker dengan Capaian IKPA Pagu Sedang (15 M s.d 50M) lingkup Kanwil DJPb Provinsi Banten



11. Penghargaan dari Kementerian Hukum sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Baik pada Pembinaan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024



12. Penghargaan dari Kementerian Hukum sebagai Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Rutan Kelas IIB Serang



13. Penghargaan Peringkat II Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



14. Peringkat I Hasil Pengisian Arsip Vital Aplikasi e-Arsip di lingkungan Kantor Wilayah UPT Kecil Kementerian Hukum dan HAM



15. Peringkat I Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI Tingkat Kantor Wilayah UPT Kecil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



Hasil pencapaian kinerja, inovasi dan prestasi yang telah diraih Kantor Wilayah Banten merupakan wujud nyata atas peran aktif Kantor Wilayah Banten dalam memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan layanan Hukum dan HAM khususnya di Wilayah Banten. Diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi Kementerian Hukum dan HAM RI serta masyarakat luas.

BAB 1

PENDAHULUAN

Menyajikan uraian singkat tentang latar belakang dan gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis dan isu strategis organisasi, serta sistematika penyusunan laporan kinerja.

PENGAYOMAN

LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang peraturan perundang-undangan, bidang pemasyarakatan, dan bidang keimigrasian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka disusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2024 dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

TUGAS, FUNGSI, & STRUKTUR ORGANISASI

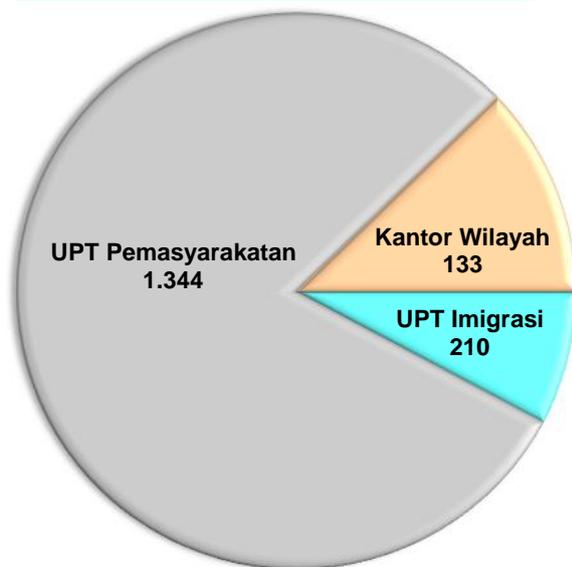
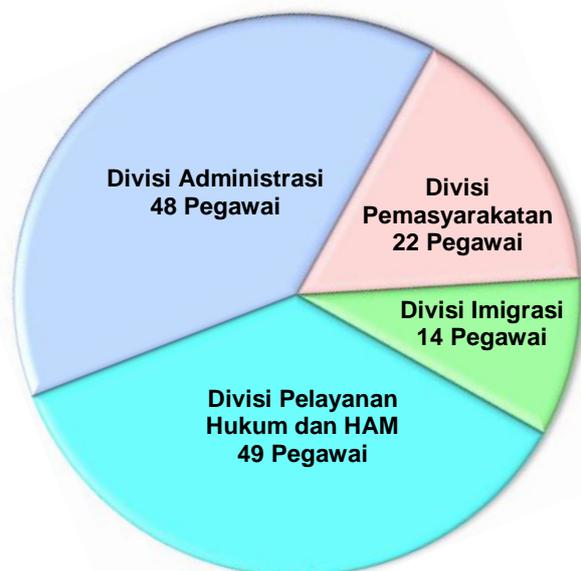
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.

3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengeordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Banten di dukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Banten berjumlah 1.687 orang, dimana 133 orang diantaranya merupakan pegawai pada Kantor Wilayah Banten. Berikut data sebaran pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten :

PEGAWAI PADA SATUAN KERJA**PEGAWAI KANTOR WILAYAH BANTEN**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Divisi, yaitu :

1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Masyarakat
3. Kepala Divisi Keimigrasian
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten diantaranya :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Tangerang
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir
10. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang
11. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang
12. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang
13. Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
14. Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang
15. Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir
16. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Serang
17. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang
18. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang
19. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

Adapun tugas dan fungsi yang diemban pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengekoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengekoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengekoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengekoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengekoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di

lingkungan Kantor Wilayah; dan

- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

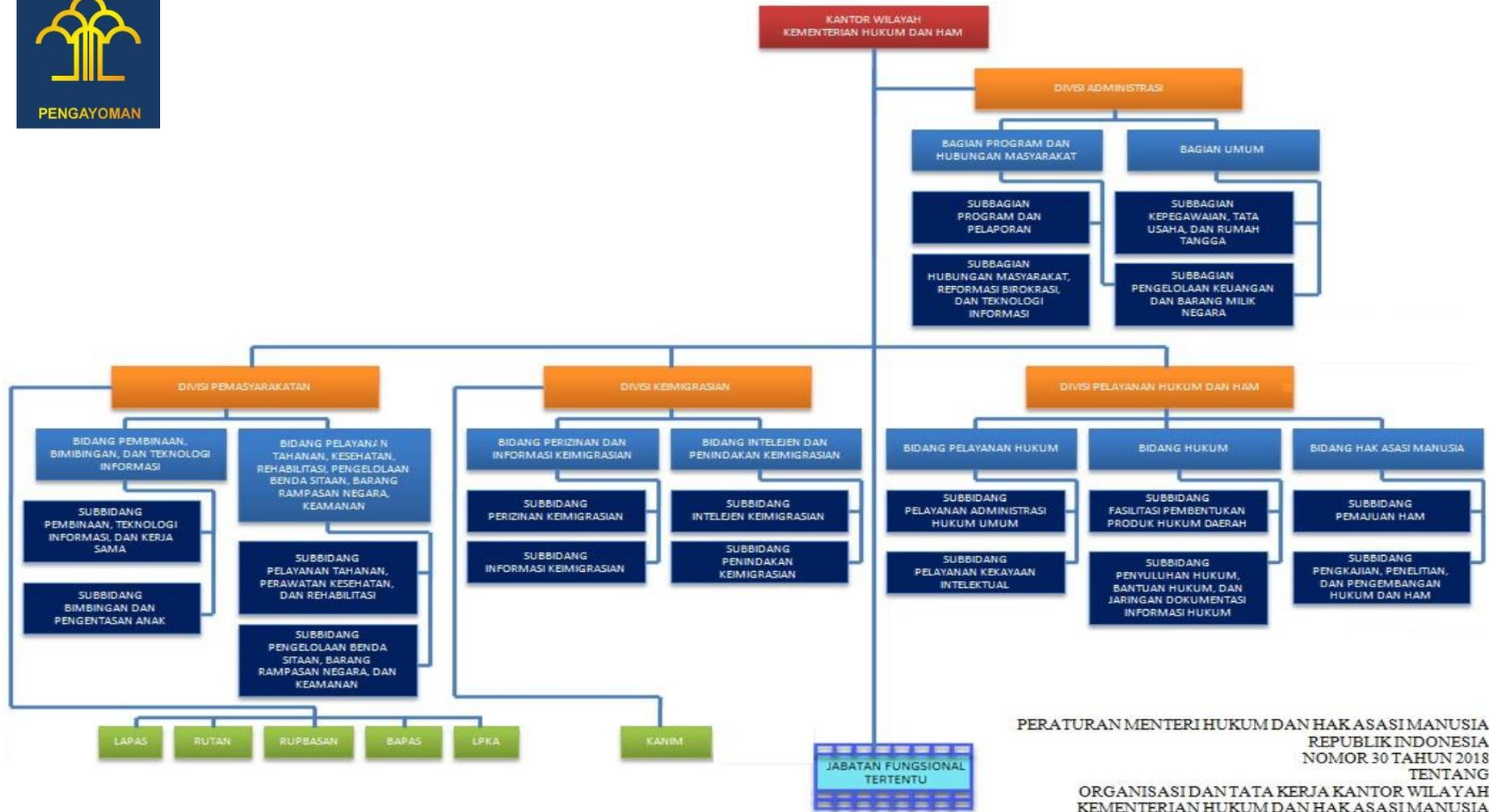
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, dan pejabat fungsional tertentu;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN



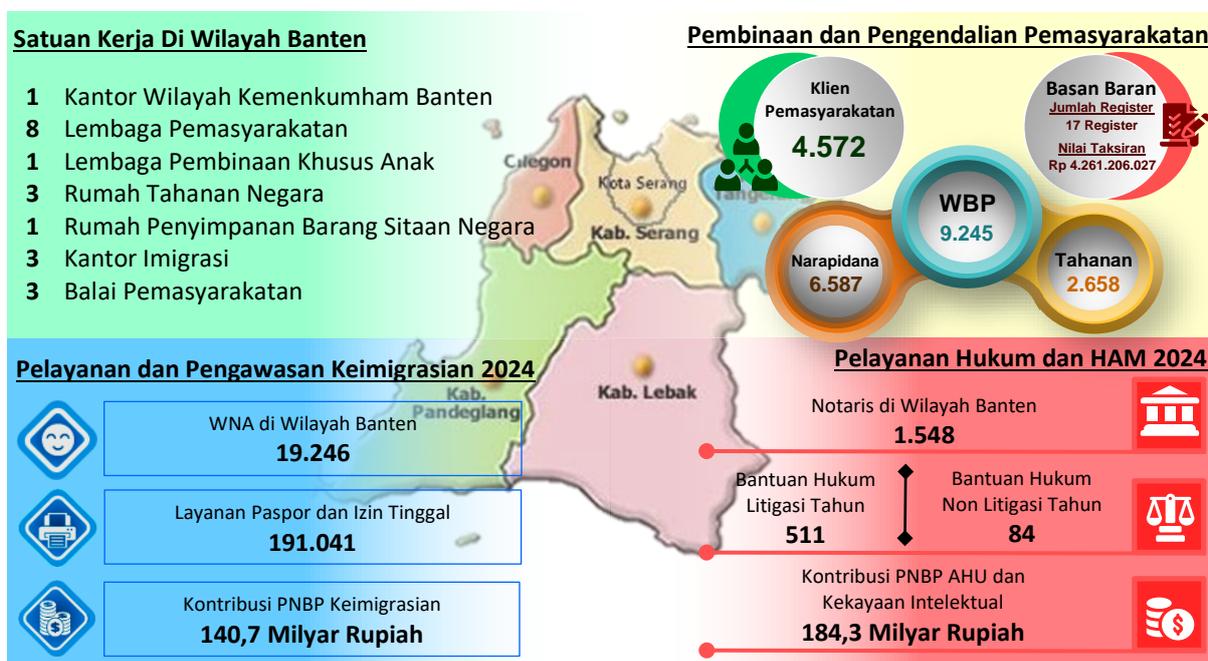
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi serta dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

ASPEK STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Banten, Kantor Wilayah Banten berperan dalam menyediakan layanan Hukum dan HAM serta mengoptimalkan potensi keragaman dan kearifan lokal guna mendukung Visi dan Misi Presiden. Aspek strategis yang menjadi peran penting keberadaan Kantor Wilayah Banten dalam menyediakan pelayanan dan mengoptimalkan potensi di Wilayah Banten diantaranya :



ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2024, terdapat beberapa potensi kendala yang menjadi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- Proses pembangunan Reformasi Birokrasi tidak optimal.
- Potensi Gratifikasi dan pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Potensi Temuan pemeriksaan keuangan atas pertanggungjawaban perjalanan dinas
- Potensi kehilangan aset BMN diruang kerja
- Tidak optimalnya PNBP atas konduite Notaris di Wilayah
- Masyarakat tidak mendapat kepastian hukum atas penyelesaian laporan pengaduan dugaan pelanggaran jabatan notaris
- Penyusunan Raperda berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Ruang perpustakaan belum efektif untuk layanan masyarakat
- Pengelolaan buku JDIH tidak sesuai dengan standar (Penomoran, kode, klasifikasi, dll)
- Desa/kelurahan tidak antusias dengan program desa/kelurahan sadar hukum
- Terdapat barang terlarang didalam blok hunian (HP, Miras, Narkoba, dll)

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Periode Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

IKHTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan uraian singkat tentang latar belakang dan gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis dan isu strategis organisasi, serta sistematika penyusunan laporan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan Visi dan Misi, Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja (penetapan rencana kegiatan yang akan dicapai yang berisi sasaran, Indikator Kinerja, dan alokasi anggaran)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Kinerja Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mencapai target kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten serta strategi rencana kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

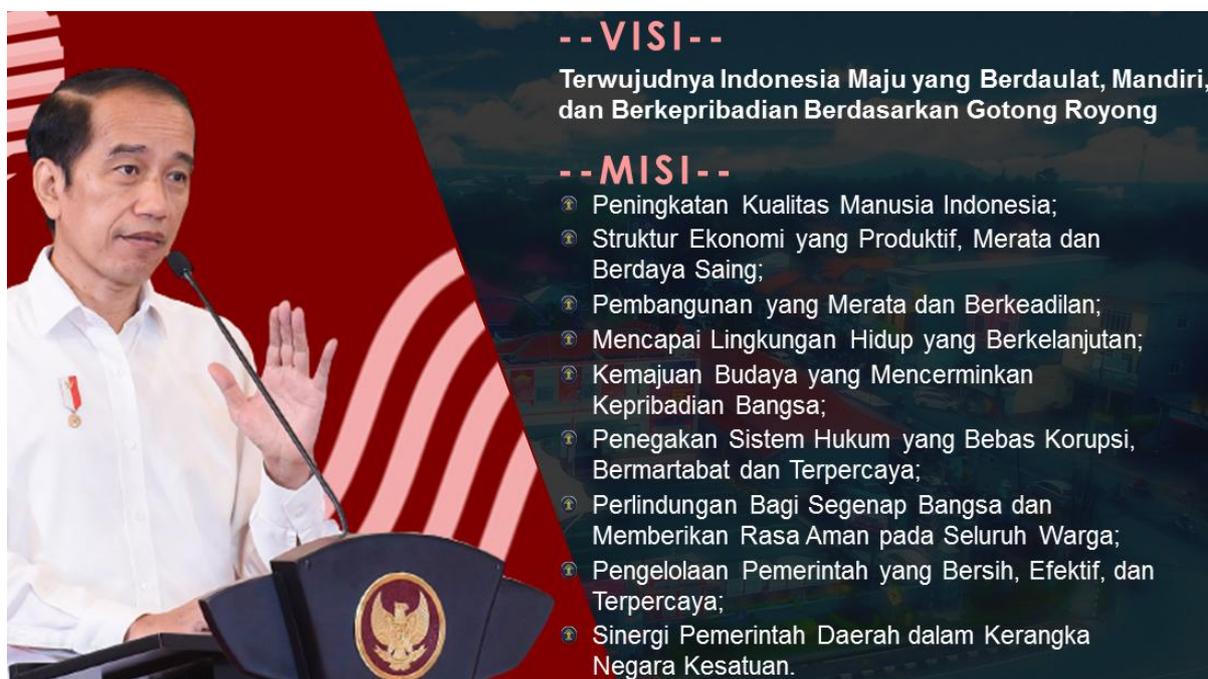
Menyajikan Visi dan Misi, Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja (penetapan rencana kegiatan yang akan dicapai yang berisi sasaran, Indikator Kinerja, dan alokasi anggaran)

PENGAYOMAN

RENCANA STRATEGIS

VISI, MISI & TUJUAN

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “*Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju*”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.



-- VISI --
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong

-- MISI --

- ① Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- ① Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
- ① Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- ① Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- ① Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- ① Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- ① Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- ① Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- ① Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Banten mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Misi Nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Misi Nomor 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara. Terakhir Misi Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga Misi Presiden tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 2 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki misi untuk mempromosikan penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Paradigma penegakan dan kesadaran hukum yang dilaksanakan mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta layanan bantuan hukum hingga proses penegakan hukum dalam membentuk sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia juga harus dilaksanakan dalam mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang terkait dengan kebebasan berbicara, pers, dan informasi, serta hak-hak terkait dengan perlindungan dan keadilan.

Secara keseluruhan, makna misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan Berorientasi kepada Masyarakat/ Publik.
- c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
- e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
- f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c) Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekedar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara

mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

- d) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
- e) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan 1 : Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia.
Tujuan pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia yang diukur melalui indikator rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L
- b. Tujuan 2 : Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diukur melalui peningkatan capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan core value ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). *Ultimate outcome* yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yaitu :

Sasaran RPJMN 2020-2024 (<i>ultimate outcome</i>)	Sasaran Strategis (<i>Intermediate Outcome</i>)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Ultimate Outcome 1 : Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Intermediate Outcome 1.1 (SS1) : Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	IKSS 1 : Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
Ultimate Outcome 2 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Intermediate Outcome 1.1 (SS2) : Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	IKSS 2 : Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah diuraikan akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian akan diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP) dan Sasaran Indikator Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Kantor Wilayah Banten yang merupakan Unit Eselon II Kementerian Hukum dan HAM mengemban Sasaran Kegiatan (SK) untuk mendukung tercapainya Sasaran Program (SP) pada Unit Eselon I sehingga dapat mewujudkan Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Penjabaran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dan merupakan cascading/turunan dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diuraikan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
				Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan
		Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan
					Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan
					Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah					

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)		
					Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan		
				Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan		
		Meningkatnya Kualitas Layanan AHU		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU		Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah
						Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan
		Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan		Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/Anak Binaan Sesuai dengan Standar
							Persentase Tahanan /Narapidana/Anak /Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas
							Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
							Persentase Tahanan/Narapidana/Anak /Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani
							Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)
					Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak/Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar
					Persentase Tahanan/Narapidana/Anak /Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB
					Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat
					Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA
				Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian
					Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi
					Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi
					Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
					Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
					Persentase Narapidana yang Bekerja
				Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemsarakatan di wilayah
				Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar
					Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)
					Persentase Kepatuhan dan Kedisiplinan terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban
					Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas
				Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat
					Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi
					Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar
					Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
					Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi
					Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak
				Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying
					Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian
					Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
				Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya
					Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	
				Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap	
					Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	
					Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial	
		Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima
						Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan
						Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani
						Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah
						Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum		Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi					

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	
					Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	
				Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	
Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	
		Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan
				Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi
				Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
					Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan	

PERJANJIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2024 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	DIPA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
A	B	C	D	E
1	Sekjen – Dukungan Manajemen	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1
2	Administrasi Hukum Umum	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%
3	Kekayaan Intelektual	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

NO	DIPA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
A	B	C	D	E
4	Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
			Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Kegiatan
		Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%
		Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%
			Persentase layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum nonlitigasi	80%
		Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%
6	Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
			Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
			Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
			Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%

NO	DIPA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
A	B	C	D	E
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,87
		Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%
7	Badan Strategi Kebijakan	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%
8	Keimigrasian	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
			Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
		Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
			Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan	3,1
9	Pemasyarakatan	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah	3,6
			Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan
			Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan	90%

PAGU ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi kinerja anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

**PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN
A	B	C
	Kantor Wilayah Banten	425.546.833.000
1	Setjen – Dukungan Manajemen	20.647.080.000
2	Administrasi Hukum Umum	2.838.178.000
3	Kekayaan Intelektual	2.374.578.000
4	Peraturan Perundang-undangan	498.635.000
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	2.257.696.000
6	Hak Asasi Manusia	251.447.000
7	Badan Strategi Kebijakan	249.259.000
8	Imigrasi	103.725.959.000
	a. Divisi Imigrasi	2.447.456.000
	b. Kanim Tangerang	27.680.372.000
	c. Kanim Cilegon	12.198.447.000
	d. Kanim Serang	61.399.684.000
9	Pemasyarakatan	284.678.792.000
	a. Divisi Pemasyarakatan	1.396.956.000
	b. LP Kls I Tangerang	90.499.230.000
	c. LP Pemuda Tangerang	42.962.409.000
	d. LP Perempuan Tangerang	10.360.020.000
	e. LP Kls IIA Tangerang	19.738.254.000
	f. LPKA Tangerang	10.581.300.000
	g. LP Terbuka Ciangir	4.800.827.000
	h. LP Serang	16.282.467.000
	i. LP Cilegon	25.723.369.000

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN
A	B	C
	j. LP Rangkasbitung	7.411.282.000
	k. Rutan Tangerang	25.992.259.000
	l. Rutan Serang	12.288.271.000
	m. Rutan Pandeglang	7.632.856.000
	n. Bapas Tangerang	6.754.476.000
	o. Bapas Serang	5.034.509.000
	p. Bapas Ciangir	3.045.725.000
	q. Rupbasan Serang	2.199.791.000

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Kinerja Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mencapai target kinerja.

PENGAYOMAN

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

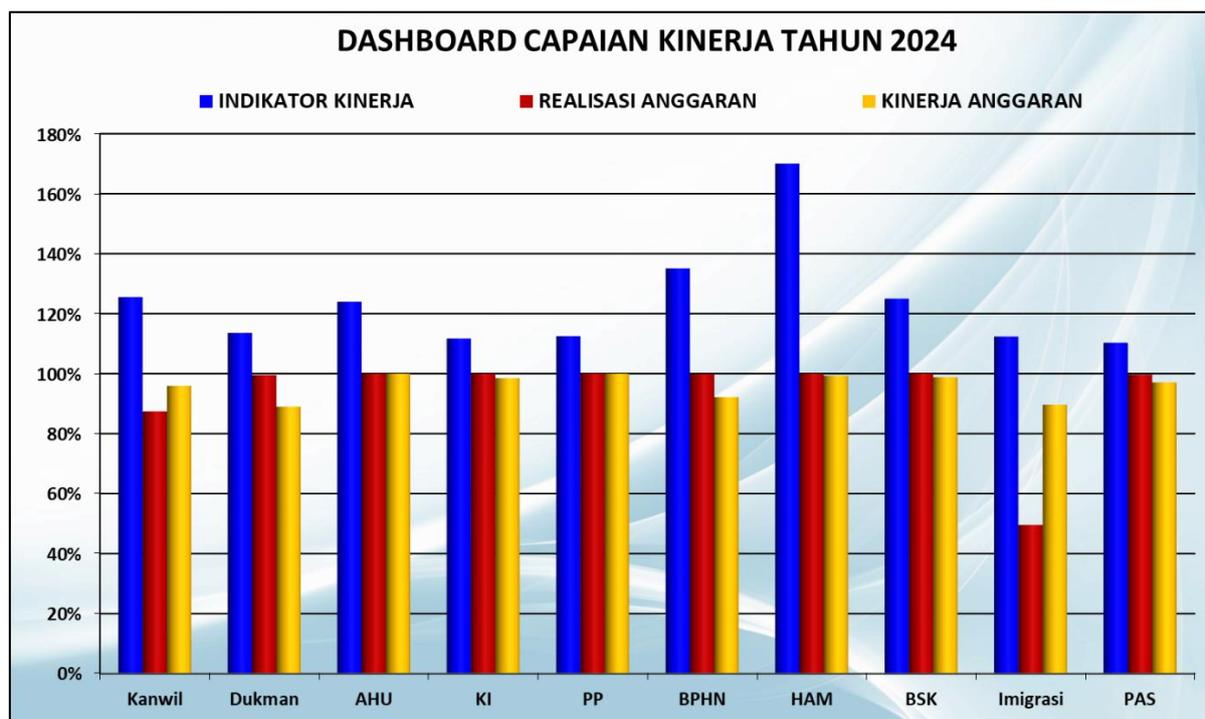
Pengukuran kinerja (*performance*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dan Realisasi anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Hasil pengukuran kinerja Kantor Wilayah Banten periode Tahun 2024, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut :

KANTOR WILAYAH BANTEN

DASHBOARD CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	DIPA	CAPAIAN KINERJA			PERFORMANCE	EFISIENSI SUMBER DAYA
		INDIKATOR KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KINERJA ANGGARAN		
A	B	C	D	E	$F = \frac{(C+D+E)}{3}$	G=C-D
A	Kantor Wilayah Banten	125,54%	87,43%	95,95%	102,97	38,10%
1	Setjen - Dukungan Manajemen	113,58%	99,51%	89,01%	100,70%	14,07%
2	Adminstrasi Hukum Umum	123,97%	99,97%	100,00%	107,98%	24,01%
3	Kekayaan Intelektual	111,71%	99,97%	98,52%	103,40%	11,75%

NO	DIPA	CAPAIAN KINERJA			PERFORMANCE	EFISIENSI SUMBER DAYA
		INDIKATOR KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KINERJA ANGGARAN		
A	B	C	D	E	$F = \frac{(C+D+E)}{3}$	G=C-D
4	Peraturan Perundang-undangan	112,50%	100,00%	100,00%	104,17%	12,50%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	135,10%	99,86%	92,19%	109,05%	35,24%
6	Hak Asasi Manusia	170,03%	100,00%	99,30%	123,11%	70,03%
7	Badan Strategi Kebijakan	125,00%	100,00%	98,81%	107,94%	25,00%
8	Imigrasi	112,39%	49,56%	89,65%	83,86%	62,83%
9	Pemasyarakatan	110,30%	99,64%	97,07%	102,34%	10,66%



Berdasarkan infografis pada dashboard capaian kinerja yang telah disajikan, dari jumlah 9 DIPA pada Kantor Wilayah Banten diketahui bahwa seluruhnya telah melebihi capaian indikator kinerja diatas 100% dengan rata-rata capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten tahun 2024 sebesar 125,54%. Kemudian pada sisi anggaran, realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten periode Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 87,43%. Selanjutnya data capaian kinerja anggaran berdasarkan rata-rata dari nilai IKPA (bobot 50%) dan nilai Perencanaan Kinerja (bobot 50%) untuk periode tahun 2024 mencapai nilai 95,95%. Sehingga diketahui *performance* Kantor Wilayah Banten berdasarkan hasil rata-rata dari capaian indikator kinerja, realisasi anggaran dan kinerja anggaran periode Tahun 2024 yaitu sebesar 102,97%.

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Banten mengemban 18 Sasaran Kegiatan dengan jumlah 30 Indikator Kinerja Kegiatan. Dari jumlah 30 indikator kinerja tersebut, seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan sangat baik melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2024 dengan persentase rata-rata capaian indikator kinerja yaitu sebesar 125,54%. Berikut capaian Indikator Kinerja Kantor Wilayah Banten Tahun 2024 :

**REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

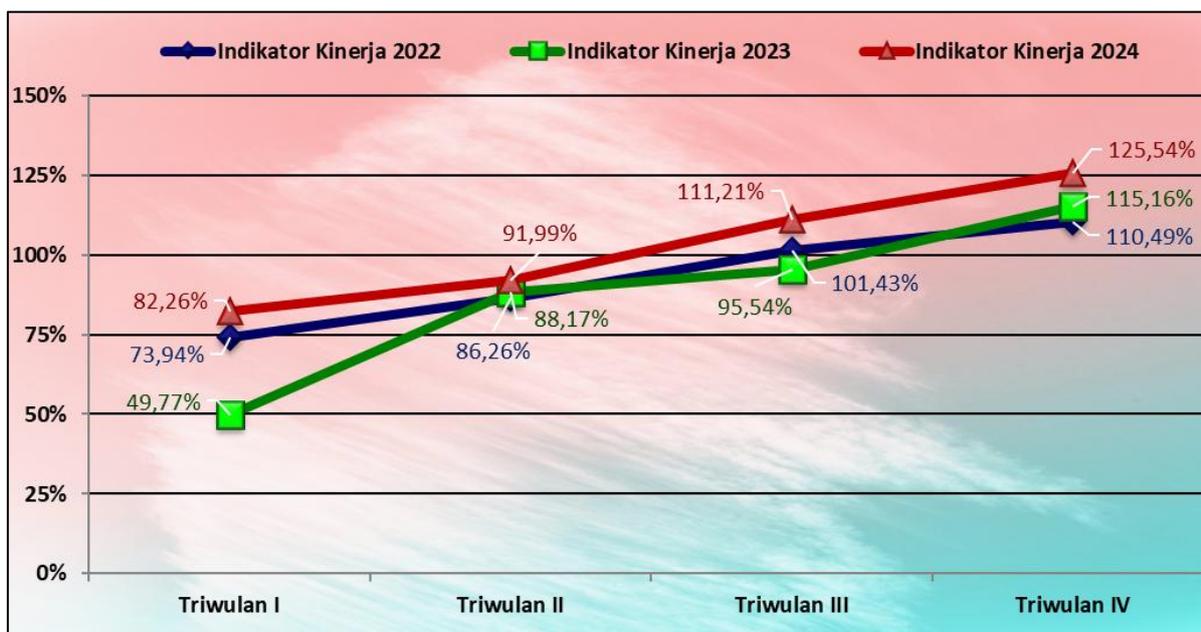
DIPA/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Kantor Wilayah Banten				125,54%
Setjen - Dukungan Manajemen				113,58%
Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100,00%
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,942	127,16%
Administrasi Hukum Umum				123,97%
Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	8,21%	136,83%
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	100,00%	111,11%
Kekayaan Intelektual				111,71%
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	-	-
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	85%	121,43%
	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	20,40%	102,00%

DIPA/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Peraturan Perundang-undangan				112,50%
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100,00%	125,00%
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang	12	100,00%
Badan Pembinaan Hukum Nasional				135,10%
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	1	100,00%
	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Kegiatan	1	100,00%
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	62,50%	250,00%
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	91,59%	111,70%
	Persentase layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum nonlitigasi	80%	95,23%	119,04%
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	90,91%	129,87%
Hak Asasi Manusia				170,03%
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	71,43%	142,86%
	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	66,66%	266,64%
	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang	35%	87,50%	250,00%

DIPA/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
	Berpartisipasi di Wilayah			
	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100,00%	133,33%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,87	3,87	116,22%
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100,00%	111,11%
Badan Strategi Kebijakan				125,00%
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100,00%	125,00%
Keimigrasian				112,39%
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100,0%	111,11%
	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100,0%	111,11%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100,00%	111,11%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100,0%	100,00%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan	3,1	3,987	128,61%
Pemasyarakatan				110,30%
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di	Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah	3,6	3,691	102,52%

DIPA/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Wilayah				
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup UPT Pemasarakatan	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	90%	100%	100,00%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretariatan	90%	3,98	128,39%

**REALISASI INDIKATOR KINERJA YEAR ON YEAR (YoY)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**



Berdasarkan data capaian indikator kinerja *year on year* (YoY) Kantor Wilayah Banten, diketahui bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 133,69% telah meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 115,16% atau meningkat sebesar 18,53%. Hal ini menunjukkan progress positif atas pencapaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten di tahun 2024. Penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Setjen - Dukungan Manajemen				113,58%
Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100,00%
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,942	127,16%

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rencana aksi RB Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{63}{63} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Pelaksanaan rencana aksi RB}}{\text{Target pelaksanaan rencana aksi RB}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah indikator rencana aksi RB Kantor Wilayah yang terlaksana dibagi dengan total indikator rencana aksi RB Kantor Wilayah. Pada tahun 2024 seluruh indikator rencana aksi RB Kantor Wilayah telah terlaksana dengan total sebanyak 63 indikator rencana aksi RB sehingga realisasi indikator kinerja tercapai 100%. Mengacu kepada target indikator kinerja tahun 2024, maka persentase capaian indikator kinerja telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Tidak ditargetkan	-	-	3,1	3,947	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	100%

Indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung kegiatan-kegiatan diantaranya:

- Penetapan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan RB.

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pemenuhan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Pendampingan secara intens atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Kantor Wilayah Banten

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung hasil pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Pelaksanaan penancangan dan komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Pelaksanaan rapat evaluasi setiap triwulan oleh pimpinan kepada seluruh tim pokja atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Banten.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,942	127,16

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal}}{\text{Target Indeks Kepuasan Layanan Internal}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,942}{3,1} \times 100\% = \mathbf{127,16\%}$$

Realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil Survei Integritas pegawai Kantor Wilayah Banten terkait layanan internal pada Kantor Wilayah Banten yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi: <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/> dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil rata-rata penilaian survei Integritas pada Kantor Wilayah Banten periode Januari – Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja	Rata-rata Responden	Hasil Survei Integritas	
		Skala (100)	Konversi Skala 4
A	B	C	$D = (\frac{C}{100}) \times 4$
Kanwil Banten	115	98,56	3,942

Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui nilai Integritas terkait layanan internal pada Kantor Wilayah Banten sebesar 3,942 (skala 4). Hasil capaian tersebut telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan target indeks kepuasan layanan internal sebesar 3,1 atau telah mencapai 127,16% dari target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,947	127,32%	3,1	3,942	127,16%

Berdasarkan data yang disajikan, Realisasi Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 3,952. Namun secara keseluruhan capaian kinerja selama tahun 2023-2024 telah tercapai secara optimal melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas layanan internal pada Kantor Wilayah Banten telah memadai dan telah memenuhi kebutuhan pengguna layanan/pegawai.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	2,84	3,1	3,1	3,1	3,1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi kinerja pada tahun 2024 atas Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah telah melebihi target yang ditetapkan selama periode 2020-2024. Target di tahun 2024 adalah 3,1 Indeks, sedangkan realisasi di tahun 2024 sebesar 3,942 Indeks.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks kepuasan layanan internal di

lingkungan Kantor Wilayah Banten dikarenakan nilai survey yang optimal dengan responden pegawai Kantor Wilayah Banten terhadap layanan-layanan internal pada Kantor Wilayah Banten, diantaranya :

- Tersedianya dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN, dan Kerumahtanggaan
- Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- Pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai
- Terpenuhi sarana dan prasarana perkantoran

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung hasil pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja dan anggaran, pembinaan dan penguatan pembangunan Zona Integritas, dan Pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM.
- Transformasi pelayanan publik melalui inovasi berbasis teknologi informasi yaitu Sistem JAWARA sebagai pengganti Layanan Tatap Muka di Pusat Layanan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Banten sehingga dapat memudahkan masyarakat pengguna layanan dimanapun dan kapanpun.
- Implementasi inovasi SINOBITA untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan atas publikasi berita baik pada Kantor Wilayah maupun pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
- Optimalisasi tingkat keamanan ruang perkantoran melalui inovasi *face smart access lock*, ketersediaan CCTV, alarm *panic button*, & alat pemadam kebakaran.
- Pelaksanaan Kamis Taqwa dan ketersediaan fasilitas alat kebugaran (Gym) dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani pegawai.

DIVISI YANKUM – ADMINISTRASI HUKUM UMUM

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Administrasi Hukum Umum				123,97%
Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	8,21%	136,83%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	100,00%	111,11%

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	8,21%	136,83%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{PNBP AHU 2024} - \text{Rerata PNBPAHU 2020-2023}}{\text{Rerata PNBPAHU 2020-2023}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{165.616.525.000 - 153.055.350.000}{153.055.350.000} \times 100\% = 8,21\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase peningkatan PNBPAHU}}{\text{Target Persentase peningkatan PNBPAHU}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{8,21\%}{6\%} \times 100\% = 136,83\%$$

Berdasarkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Banten diketahui pada periode tahun 2024 mengalami peningkatan PNBPAHU sebesar 8,21% dibandingkan dengan realisasi rata-rata PNBPAHU tahun 2020-2023. Jika melihat target yang ditetapkan yaitu peningkatan PNBPAHU tahun 2024 sebesar 5%, maka capaian indikator kinerja telah mencapai 136,83%. Rincian realisasi peningkatan PNBPAHU tahun 2024 sebagai berikut:

Realisasi PNBPAHU				
2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
A	B	C	D	D = $\frac{A+B+C}{3}$
103.025.950.000	152.605.950.000	176.149.700.000	180.439.800.000	153.055.350.000

2020-2023	2024	Kenaikan	
Rerata Realisasi PNBPAHU	Realisasi PNBPAHU	Kenaikan PNBPAHU	%
A	C	D = C-B	E = $\frac{D}{B}$
153.055.350.000	165.616.525.000	12.561.175.000	8,21%

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	25,59%	511,8%	6%	8,21%	136,83%

Berdasarkan data yang disajikan, Realisasi pada periode tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Namun mengacu kepada target yang telah ditetapkan, realisasi kinerja di tahun 2024 telah tercapai melebihi target di tahun 2023-2024. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja AHU di Wilayah telah dilaksanakan dengan sangat optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Tidak ditargetkan	5%	5%	5%	6%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi kinerja periode tahun 2023 atas Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah telah jauh melampaui target tahun 2024 yaitu sebesar 5%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan yang menunjang keberhasilan diantaranya melaksanakan kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum dengan materi seputar Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Perseroan Perorangan, dan juga Apostille.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Pengawasan penerapan PMPJ oleh Tm Audit Pengawas Kepatuhan kepada Notaris di Wilayah
- Pelaksanaan diseminasi layanan Perseroan Perorangan
- Pelaksanaan diseminasi layanan Kewarganegaraan & Pewarganegaraan
- Pelaksanaan diseminasi layanan Partai Politik
- Pelaksanaan diseminasi layanan Apostille

2. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	100%	111,11%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi penyelesaian laporan pengaduan}}{\text{Target penyelesaian laporan pengaduan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Pada periode tahun 2024, realisasi indikator kinerja persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan telah mencapai 100%. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 90%, maka capaian kinerja atas indikator kinerja tersebut telah tercapai sebesar 111,11%. Jumlah realisasi persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan sebagai berikut:

No	MPD	Jumlah Pengaduan	Jumlah Penyelesaian	Realisasi
A	B	C	D	$E = \frac{C}{D}$
1	Kabupaten Tangerang	4	4	100%
2	Kota Tangerang Selatan	9	9	100%
3	Kota Cilegon	2	2	100%
4	Kabupaten Serang	2	2	100%
5	Kota Serang	1	1	100%
6	Kabupaten Pandeglang	2	2	100%
	Jumlah	20	20	100%

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	86%	100%	116,28%	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data tersebut, persentase capaian kinerja tahun 2024 menurun dibandingkan capaian tahun 2023 hal tersebut dikarenakan terdapat kenaikan target indikator kinerja pada tahun 2024. Namun secara realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023-2024 telah tercapai optimal yaitu sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	Tidak ditargetkan	82%	84%	86%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian kinerja periode tahun 2024 atas persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah telah mampu melampaui target jangka menengah tahun 2020-2024 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Dalam pelaksanaan indikator kinerja, terdapat kendala yang bersifat *uncontrollable* dan sebagian besar berasal dari eksternal (pihak luar) yaitu sulit terpenuhinya unsur majelis (Akademisi, Notaris, Pemerintah) dalam sidang pemeriksaan MPW dikarenakan kesibukan profesi, sehingga penyelesaian atas laporan pengaduan Notaris tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan. Selain itu,

sebagian besar jumlah pelaksanaan sidang untuk setiap kasus melebihi batas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu melebihi 2 kali pelaksanaan sidang.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja diantaranya Pelaksanaan Sosialisasi Beneficial Ownership, Sosialisasi PMPJ, Rapat Evaluasi MPW, koordinasi dengan MPD, serta melakukan sidang secara berkala pada hari Selasa dan Kamis setiap minggunya.

DIVISI YANKUM – KEKAYAAN INTELEKTUAL

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Kekayaan Intelektual				111,71%
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	-	-
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	85%	121,43%
	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	20,40%	102,00%

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	-	-

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian aduan pelanggaran KI}}{\text{Total pengaduan atas pelanggaran KI}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{Nihil}$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi penyelesaian aduan pelanggaran KI}}{\text{Target penyelesaian aduan pelanggaran KI}} \times 100\%$$

Capaian = Nihil

Sepanjang tahun 2024, belum terdapat pengaduan tentang pelanggaran Kekayaan Intelektual di lingkungan Kantor Wilayah Banten. Untuk mencegah anomali hasil capaian kinerja berdasarkan konsep SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*), maka hasil pengukuran capaian indikator kinerja tersebut tidak dapat diperhitungkan atau dikategorikan sebagai Nihil.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	30%	Nihil	Nihil

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2023 dan 2024, realisasi indikator kinerja persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2024 dinyatakan Nihil dikarenakan tidak terdapat aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Banten. Sedangkan pada periode tahun 2023 terdapat sejumlah 1 aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan status terselesaikan sehingga capaian indikator kinerja ditahun 2023 sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tidak ditargetkan	100%	100%	100%	30%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka hasil capaian pada periode tahun 2024 atas indikator kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah belum dapat diperhitungkan atau dikategorikan Nihil karena tidak adanya laporan pengaduan tentang pelanggaran Kekayaan Intelektual dilingkungan Kantor Wilayah Banten.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Penyelenggaraan layanan publik yang baik kepada masyarakat dengan

memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah dan efisien. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual secara masiv ke berbagai daerah di kabupaten/kota.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Capaian target yang telah diraih tak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Program/kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan pemahaman/diseminasi informasi KI dan edukasi kepada masyarakat.

2. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	85%	121,43%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di Wilayah}}{\text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi KI di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1445 \text{ orang}}{1700 \text{ orang}} \times 100\% = 85\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah}}{\text{Target persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{85\%}{70\%} \times 100\% = 121,43\%$$

Pada periode tahun 2024, jumlah pelaksanaan kegiatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual di Wilayah Banten sebanyak 38 kegiatan dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 1.700 orang. Perhitungan realisasi indikator kinerja diukur dari jumlah peserta kegiatan yang memahami KI berdasarkan nilai *post assessment* lebih besar 10% dibanding nilai *pre assessment*. Dari hasil perhitungan, jumlah peserta yang memahami KI berdasarkan hasil *post assessment* yaitu sebanyak 1.445 orang dari total peserta 1.700 orang maka persentase realisasi indikator kinerja sebesar 85%. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 70%, maka capaian indikator kinerja dari persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah telah tercapai 121,43%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tidak ditargetkan	-	-	70%	85%	121,43%

Indikator kinerja atas persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah tidak ditargetkan pada periode tahun 2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja di tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena tidak ditargetkan atas indikator kinerja tersebut di tahun 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	70%

Indikator kinerja atas persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pemberian informasi dan penyelenggaraan layanan publik yang baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan pelayanan

publik yang cepat, murah dan efisien. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual secara masiv ke berbagai daerah di kabupaten/kota serta melaksanakan kegiatan Guru KI (RUKI) sebagai upaya lebih mendekatkan lagi pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat karena digelar di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Pelaksanaan koordinasi dengan DJKI dan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha/industri, pelaku seni dan budaya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Capaian target yang telah diraih tak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Program/kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan pemahaman dan diseminasi informasi KI kepada masyarakat (termasuk sosialisasi diseminasi, dan edukasi, pengetahuan mengenai KI maupun mengenai prosedur tata cara dan/atau pendampingan dalam pengajuan permohonan pendaftaran KI) guna mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	20,40%	102,00%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Permohonan KI tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}}$$

$$\text{Realisasi} = \frac{14.723 - 12.228}{12.228} \times 100\% = 46,50\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Persentase peningkatan permohonan KI di Wilayah}}{\text{Target Persentase peningkatan permohonan KI di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{20,40\%}{20\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 102,00\%$$

Pada tahun 2024, jumlah permohonan KI di Wilayah Banten sebanyak 14.723 permohonan dan mengalami peningkatan sebesar 20,40% dibandingkan dengan jumlah permohonan KI di tahun 2023 yaitu sebesar 12.228. Mengacu kepada target indikator kinerja yang ditetapkan tahun 2024 yaitu sebesar 20%, maka hasil capaian indikator kinerja yaitu sebesar 102%. Rincian jenis permohonan Kekayaan Intelektual yang telah diproses di Wilayah Banten tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Jenis Permohonan	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	PNBP	Jumlah	PNBP
A	B	D	E	F
Paten	65	15.759.260.000	142	18.697.450.000
Hak Cipta	4.003		5.024	
Merek	7.907		9.171	
Desain Industri	253		386	
Rahasia Dagang	1		-	
Indikasi Geografis	-		-	
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	-		-	
TOTAL	12.228		14.723	

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tidak ditargetkan	-	-	20%	20,40%	102,00%

Pada tahun 2023 penetapan target indikator mengacu kepada jumlah permohonan yaitu dengan target 143 permohonan, sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan berdasarkan persentase peningkatan permohonan yaitu target sebesar 20%. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja di tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena tidak relevan dalam perhitungan capaian masing-masing indikator kinerja.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	102,00%

Indikator kinerja atas Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pemberian informasi dan penyelenggaraan layanan publik yang baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah dan efisien. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual secara masiv ke berbagai daerah di kabupaten/kota serta melaksanakan kegiatan Guru KI (RUKI) sebagai upaya lebih mendekatkan lagi pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat karena digelar di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Pelaksanaan koordinasi dengan DJKI dan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha/industri, pelaku seni dan budaya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Capaian target yang telah diraih tak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Program/kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan pemahaman dan diseminasi informasi KI kepada masyarakat (termasuk sosialisasi diseminasi, dan edukasi, pengetahuan mengenai KI maupun mengenai prosedur tata cara dan/atau pendampingan dalam pengajuan permohonan pendaftaran KI) guna mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual.

DIVISI YANKUM – PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Peraturan Perundang-undangan				110,00%
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	120,00%
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang	12	100%

1. Sasaran Kegiatan : Terasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	120%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rancangan Perda yang selesai diharmonisasi}}{\text{Total permohonan harmonisasi Perda}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{141}{141} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase rancangan perda yang difasilitasi}}{\text{Target Persentase rancangan perda yang difasilitasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Hingga tahun 2024, seluruh rancangan peraturan daerah telah di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Banten dengan jumlah sebanyak 141 Raperda terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Daerah dan 101 Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%, maka hasil capaian indikator kinerja telah tercapai 125%. Rincian Peraturan Daerah yang telah difasilitasi Kantor Wilayah sebagai berikut :

No	Rancangan Produk Hukum di Wilayah Banten		
	Wilayah	Raperda	Raperkada
1	Provinsi Banten	5	13
2	Kabupaten Serang	3	0
3	Kota Serang	1	2
4	Kabupaten Tangerang	11	6
5	Kota Tangerang	4	40
6	Kota Tangerang Selatan	8	37
7	Kabupaten Lebak	1	2
8	Kabupaten Pendeglang	1	0
9	Kota Cilegon	6	1
	TOTAL	40	101

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2023 dan 2024, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 dan 2024 telah tercapai sebesar 100%. Atas capaian tersebut, maka capaian kinerja periode 2023 telah tercapai dengan optimal dengan persentase capaian sebesar 125%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia	30 Raperda	80%	80%	80%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, capaian indikator kinerja atas persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Banten pada periode 2024 telah melampaui target jangka menengah di tahun 2021-2024 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran atas indikator Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Melakukan pendekatan baik dengan melaksanakan Koordinasi serta komunikasi yang lebih aktif sehingga dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan yang telah dicapai oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah diantaranya:

- Melaksanakan Rapat Forum Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah;
- Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12	12	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah pembinaan perancang peraturan perundang-undangan}}{\text{Total tenaga perancang peraturan perundang-undangan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam peningkatan kapasitas melalui kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah yang diikuti oleh 12 Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Banten. Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 12 orang, maka hasil capaian indikator kinerja telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12	12	100%	12	12	100%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian tahun 2023 dan 2024, capaian indikator kinerja pada tahun 2024 sama dengan capaian indikator kinerja di tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Atas capaian tersebut, maka capaian kinerja periode 2024 telah tercapai dengan optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12	12	12	12	12

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, realisasi indikator kinerja atas jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di tahun 2024 telah mencapai target di tahun 2024 dengan target indikator kinerja sebesar 12 orang. Dengan Realisasi di periode 2023 sebesar 12 orang dan realisasi di tahun 2022 sebesar 12 orang.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran atas indikator jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, melakukan pendekatan baik dengan melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih aktif dengan Pemerintah Daerah terkait Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan yang telah dicapai oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah diantaranya:

- Kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah; dan
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

DIVISI YANKUM – BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Badan Pembinaan Hukum Nasional				135,10%
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	1	100,00%
	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Kegiatan	1	100,00%
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	62,5%	250,00%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	91,59%	111,70%
	Persentase layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum nonlitigasi	80%	95,23%	119,04%
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	90,91%	129,87%

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1	1	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi jumlah analisis dan evaluasi produk hukum daerah}}{\text{Target jumlah analisis dan evaluasi produk hukum daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2024, telah selesai dilaksanakan 1 kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang tentang UMKM dan telah disusun ke dalam laporan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi. Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 kegiatan, maka capaian indikator kinerja telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	Tidak ditargetkan	-	-	1	1	100%

Pada tahun 2023 ditetapkan indikator kinerja tentang jumlah kegiatan perencanaan, pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dengan target 2 kegiatan.

Namun di tahun 2024 dikarenakan terdapat penyesuaian Rencana Strategis (Renstra), maka indikator kinerja di tahun 2023 tersebut terbagi/dipecah menjadi 2 indikator kinerja yaitu jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan, dan jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2024 sudah tidak relevan untuk dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	1

Indikator kinerja atas jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran atas indikator kinerja jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi aktif dengan seluruh Pemerintah Daerah dan stakeholder di Wilayah Banten dalam rangka pembentukan dan evaluasi atas produk hukum daerah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan diantaranya:

- Pelaksanaan rapat fasilitasi penyusunan naskah akademik
- Pelaksanaan Koordinasi permohonan data Program Legislasi Daerah (Prolegda)
- Pelaksanaan rapat penyusunan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1	1	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi jumlah kegiatan fasilitas perencanaan peraturan daerah}}{\text{Target jumlah kegiatan fasilitas perencanaan peraturan daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 1 kegiatan fasilitas perencanaan peraturan daerah di Wilayah Banten yaitu di Kabupaten Tangerang dan telah disusun dalam bentuk laporan kegiatan fasilitas Naskah Akademik dan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Berdasarkan target yang telah ditetapkan yaitu 1 kegiatan fasilitas perencanaan peraturan daerah maka hasil capaian indikator kinerja tersebut telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Tidak ditargetkan	-	-	1	1	100%*

Pada tahun 2023 ditetapkan indikator kinerja tentang jumlah kegiatan perencanaan, pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dengan target 2 kegiatan. Namun di tahun 2024 dikarenakan terdapat penyesuaian Rencana Strategis (Renstra), maka indikator kinerja di tahun 2023 tersebut terbagi/dipecah menjadi 2 indikator kinerja di tahun 2024 yaitu jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan, dan jumlah fasilitas perencanaan peraturan daerah. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2024 sudah tidak relevan untuk dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2023

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	1

Indikator kinerja atas jumlah fasilitas perencanaan peraturan daerah, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan

berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi aktif dengan seluruh Pemerintah Daerah dan stakeholder di Wilayah Banten dalam rangka Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah.
- 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator fasilitasi perencanaan peraturan daerah diantaranya:
 - Pelaksanaan rapat fasilitasi penyusunan naskah akademik
 - Pelaksanaan Koordinasi permohonan data Program Legislasi Daerah (Prolegda)
 - Pelaksanaan rapat penyusunan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah.

2. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	62,50%	25%	250%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah anggota JDIH yang dikelola}}{\text{Total anggota JDIH di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{20}{32} \times 100\% = 62,50\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase anggota JDIH yang dikelola di Wilayah}}{\text{Target persentase anggota JDIH yang dikelola di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{62,50\%}{25\%} \times 100\% = 250\%$$

Pada tahun 2024, jumlah anggota JDIH di Wilayah Banten yang telah dikelola sejumlah 20 anggota yang meliputi 18 Pemerintahan pada Provinsi Banten yaitu Biro

Hukum dan Bagian Hukum dan 2 Universitas di Wilayah Banten yaitu fakultas hukum pada Universitas Terbuka Serang dan Universitas Pamulang. Sedangkan jumlah keseluruhan anggota JDIH di Wilayah Banten yaitu sebanyak 32 anggota terdiri dari 18 Pemerintahan pada Provinsi Banten dan 14 Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Hukum, maka realisasi atas capaian kinerja tersebut yaitu sebesar 62,50%. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 25% maka hasil pengukuran capaian indikator kinerja telah tercapai 250%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anggota JDIH yang dikelola terhadap total anggota JDIH di wilayah	20%	40%	200%	20%	62,50%	250%

Berdasarkan perbandingan pada tahun 2023 – 2024, capaian indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar 250% atau meningkat sebesar 50% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 200%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja di tahun 2024 telah tercapai sangat optimal.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anggota JDIH yang dikelola terhadap total anggota JDIH di wilayah	Tidak ditargetkan	20%	20%	20%	25%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja di tahun 2024 yaitu sebesar 62,50% telah melampaui target jangka menengah berdasarkan Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran atas indikator kinerja Persentase anggota JDIH yang dikelola terhadap total anggota JDIH di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Kerjasama dan komunikasi aktif dengan seluruh anggota JDIH di Wilayah Banten, pelaksanaan pembinaan kepada anggota JDIH yang telah terintegrasi dan pendampingan kepada seluruh anggota JDIH yang belum terintegrasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pembinaan dan pengembangan JDIH dengan tema Optimalisasi Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Terpadu dan Terintegrasi Menuju

Pembangunan Hukum Nasional yang Berkualitas di Wilayah Provinsi Banten.

- Pelaksanaan penataan dokumen hukum pada laman jdihn.go.id.
- Koordinasi dalam rangka mendorong pengintegrasian JDIHN dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Stakeholder.

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan bantuan hukum di Wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	91,59%%	82%	111,70%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah bantuan hukum litigasi yang telah selesai pencairan}}{\text{Total permohonan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{468}{511} \times 100\% = 91,59\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase bantuan hukum litigasi yang diberikan}}{\text{Target persentase bantuan hukum litigasi yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{91,59\%}{82\%} \times 100\% = 111,70\%$$

Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi di tahun 2024 yaitu sebesar 511 permohonan. Sedangkan jumlah bantuan hukum litigasi yang diterima sebanyak 470 permohonan dengan 468 permohonan telah selesai pencairan. Maka realisasi atas bantuan hukum litigasi yang telah diberikan yaitu sebesar 91,59%. Berdasarkan target indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 82% maka hasil capaian indikator kinerja tersebut telah tercapai 111,70%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	95,07%	115,94%	82%	91,59%	111,70%

Berdasarkan perbandingan pada tahun 2023 – 2024, realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 91,59% atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 95,07%. Namun jika mengacu kepada target yang ditetapkan tahun

2024, maka capaian indikator kinerja di tahun 2024 telah tercapai melebihi target dengan capaian sebesar 115,94%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	376 Orang	77%	81%	82%	82%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024, Realisasi di tahun 2024 yaitu sebesar 91,59% telah melampaui target yang ditetapkan selama periode Renstra 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi atas indikator kinerja tersebut telah tercapai dengan sangat optimal.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran atas indikator kinerja Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Hasil capaian indikator kinerja di tahun 2024 yang telah tercapai optimal disebabkan telah dilakukan upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum (OBH/LBH) selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kepada Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum sehingga dapat memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum.
- Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (addendum).
- Sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

- Kegiatan pembinaan kepada pemberi bantuan hukum.
- Menyampaikan usulan kepada BPHN tentang pemberian *reward & punishment* terhadap Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan kinerja atas pelaksanaan bantuan hukum.
- Optimalisasi layanan bantuan hukum melalui Posko Bangkumis yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah dengan bekerjasama Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan bantuan hukum.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	95,23%	80%	119,04%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah bantuan hukum non litigasi yang telah selesai pencairan}}{\text{Total permohonan bantuan hukum non litigasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{80}{84} \times 100\% = 95,23\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase bantuan hukum non litigasi yang diberikan}}{\text{Target Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{95,23\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 119,04\%$$

Pada tahun 2024, jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yaitu sebanyak 84 kegiatan. Sedangkan jumlah bantuan hukum non litigasi yang telah selesai pencairan yaitu sebanyak 80 kegiatan. Maka realisasi atas indikator kinerja tersebut sebesar 95,23%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu sebesar 80%, maka hasil capaian indikator kinerja tersebut telah tercapai 119,04%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	80%	83,45%	104,31%	80%	95,23%	119,04%

Berdasarkan data perbandingan tahun 2023 – 2024, terlihat bahwa realisasi indikator

kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 95,23% telah mengalami peningkatan sebesar 11,78% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 83,45%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	23 kegiatan	79%	80%	80%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024, realisasi indikator kinerja di tahun 2024 yaitu sebesar 95,23% telah melampaui seluruh target yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja telah tercapai dengan sangat baik.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran atas indikator kinerja Persentase layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Hasil capaian indikator kinerja tahun 2024 yang tercapai optimal dikarenakan telah dilakukan upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum (OBH/LBH) selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kepada Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum sehingga dapat memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum.
- Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (addendum).
- Sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

- Kegiatan pembinaan kepada pemberi bantuan hukum.
- Mengusulkann kepada BPHN tentang pemberian *reward & punishment* terhadap Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan kinerja atas pelaksanaan bantuan hukum.
- Optimalisasi layanan bantuan hukum melalui Posko Bangkumis yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah dengan bekerjasama Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan bantuan hukum

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	90,91%	129,87%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah desa / kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa / kelurahan binaan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{80}{88} \times 100\% = 90,91\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi desa/kelurahan sadar hukum yang dikukuhkan}}{\text{Target desa/kelurahan sadar hukum yang dikukuhkan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{90,91}{70\%} \times 100\% = 129,87\%$$

Hingga tahun 2024, jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan di Wilayah Banten yaitu sebanyak 126 desa/kelurahan. Pada tahun 2024 ini telah diusulkan sebanyak 88 desa/kelurahan yang dikukuhkan untuk dilakukan pembinaan sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Sedangkan jumlah desa/kelurahan yang berhasil dikukuhkan yaitu sebanyak 80 desa/kelurahan maka realisasi atas indikator kinerja tersebut sebesar 90,91%. Berdasarkan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 80% maka hasil capaian indikator kinerja telah tercapai sebesar 129,87%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan	70%	70%	100%	70%	90,91%	129,87%

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Binaan terhadap total usulan kantor wilayah						

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, realisasi indikator kinerja di tahun 2024 yaitu sebesar 90,91% mengalami peningkatan sebesar 20,91% dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja di tahun 2023 yaitu sebesar 70%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	Tidak ditargetkan	70%	70%	70%	70%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka realisasi indikator kinerja di tahun 2024 yaitu sebesar 90,91% telah melampaui seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran atas indikator kinerja Persentase peningkatan Desa/ Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2022, pada tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM melakukan beberapa perbaikan guna percepatan pencapaian kinerja, yaitu dengan memasukkan indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing- masing Wilayah menjadi salah satu Target Kinerja Kantor Wilayah sehingga memberikan daya dorong pada Kantor Wilayah untuk mengusulkan/merekomendasikan desa binaan di wilayahnya untuk dibentuk sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu, dilakukan juga pembinaan oleh BPHN terhadap Kantor Wilayah sebagai pelaksana program sehingga memahami formulasi hitung pada indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah melalui kegiatan sosialisasi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja kepada masing – masing Kantor Wilayah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dengan menjadikan indikator ini sebagai salah satu Target Kinerja di Kantor Wilayah, telah mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah. Mengubah indikator kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM juga membawa perubahan besar dalam keberhasilan pencapaian target. Jika target pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019 didasarkan pada jumlah desa sadar hukum yang diresmikan, target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 lebih dititikberatkan pada hasil verifikasi desa/kelurahan binaan yang dianggap layak untuk diresmikan sebagai desa sadar hukum.

DIVISI YANKUM – HAK ASASI MANUSIA

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Hak Asasi Manusia				170,03%*
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	71,43%	142,86%
	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	66,66%	266,64%
	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	87,50%	250,00%
	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100,00%	133,33%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33	3,87	116,22%
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100,00%	111,11%

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	71,43%	142,86%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{5}{7} \times 100\% = 71,43\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase jumlah pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{Target persentase jumlah pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{71,43\%}{50\%} \times 100\% = 142,86\%$$

Pada tahun 2024, terdapat 5 pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang telah selesai ditindaklanjuti dari total 7 pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Wilayah Banten. Maka realisasi atas pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang telah ditindaklanjuti sebesar 71,43%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2024 atas indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 50%, maka hasil capaian indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 142,86%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	3	10	333,33%	50%	71,43%	142,86%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024 terdapat perubahan metode pengukuran target indikator kinerja, dimana pada tahun 2023 target yang ditetapkan bersifat kuantitatif sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan bersifat kualitatif. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan

Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Jika dilihat dari persentase capaian indikator kinerja, capaian di tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023, namun persentase hasil capaian tahun 2024 tersebut telah sangat optimal karena telah melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Wilayah	3	3	3	3	50%

Pada indikator kinerja atas Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Wilayah, terdapat perubahan metode pengukuran target indikator kinerja, dimana pada tahun 2020-2023 target yang ditetapkan bersifat kuantitatif sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan bersifat kualitatif. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut tidak relevan / belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran atas indikator kinerja persentase dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan atas capaian indikator kinerja dapat dipenuhi apabila kedua belah pihak menemukan kesepakatan serta pada saat kantor wilayah memberikan rekomendasi kepada instansi terkait, instansi tersebut menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan rapat Telaah untuk mengetahui Dugaan Pelanggaran HAM yang diadakan
- Pelaksanaan Koordinasi untuk melakukan klarifikasi Dugaan Pelanggaran HAM
- Pelaksanaan rapat Audiensi Yankomas yang mempertemukan kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	66,66%	266,64%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM}}{\text{Jumlah K/L/D di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{6 \text{ Pemerintah Daerah}}{9 \text{ Pemerintah Daerah}} \times 100\% = 66,66\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM}}{\text{Target K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{66,66\%}{25\%} \times 100\% = 266,64\%$$

Pada tahun 2024, diseminasi dan penguatan HAM telah dilakukan pada 6 Pemerintah Daerah yaitu pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang, dari total 9 Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. Realisasi atas capaian indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 66,66%. Berdasarkan target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu sebesar 25%, maka capaian indikator kinerja telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 266,64%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			202		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	1	18	1800%	25%	66,66%	266,64%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024 terdapat perubahan narasi dan metode pengukuran target indikator kinerja, dimana

pada tahun 2023 target yang ditetapkan bersifat kuantitatif sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan bersifat kualitatif. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024 karena adanya perbedaan formulasi pengukuran indikator kinerja sehingga tidak relevan. Jika dilihat dari persentase capaian indikator kinerja, capaian di tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023, namun persentase hasil capaian tahun 2024 tersebut telah sangat optimal karena telah melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	1	1	2	1	25%

Pada indikator kinerja atas Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan, terdapat perubahan narasi dan metode pengukuran target indikator kinerja, dimana pada tahun 2020-2023 target yang ditetapkan bersifat kuantitatif sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan bersifat kualitatif. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, realisasi indikator kinerja tersebut tidak relevan / belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang intens dengan seluruh pemerintah daerah di Wilayah Banten, serta melakukan pendampingan/ asistensi kepada Pemerintah Daerah dan stakeholder

dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Banten

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan Diseminasi dengan Tema Pencegahan Perundungan di Pondok Pesantren.
- Pelaksanaan Diseminasi terkait Bisnis dan HAM dengan peserta dari Pemprov Banten dan Perusahaan di Wilayah Banten
- Memenuhi permohonan narasumber atas pelaksanaan kegiatan HAM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	87,50%	250%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten atau kota di Wilayah yang mendapatkan predikat Peduli HAM}}{\text{Jumlah Kabupaten atau kota di Wilayah yang berpartisipasi}}$$

$$\text{Realisasi} = \frac{7}{8} \times 100\% = 87,50\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase Kab atau Kota yang mendapatkan predikat Peduli HAM}}{\text{Target persentase Kab atau Kota yang mendapatkan predikat Peduli HAM}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{87,50\%}{35\%} \times 100\% = 250\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor: MHA-01.HA.02.01.01 tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM bahwa terdapat 7 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Banten yang mendapatkan Predikat Peduli HAM dari total 8 Kab/Kota di Wilayah Banten yang ikut berpartisipasi. Maka realisasi atas indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 87,50%. Mengacu kepada target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 35%, maka hasil capaian indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 250%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	1	8	800%	35%	87,50%	250%

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah						

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024 terdapat perubahan metode pengukuran target indikator kinerja, dimana pada tahun 2023 target yang ditetapkan bersifat kuantitatif sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan bersifat kualitatif. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024 karena adanya perbedaan formulasi pengukuran indikator kinerja sehingga tidak relevan. Jika dilihat dari persentase capaian indikator kinerja, capaian di tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023, namun persentase hasil capaian tahun 2024 tersebut telah sangat optimal karena telah melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/ Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	1	1	1	1	35%

Pada indikator kinerja persentase kabupaten/kota peduli hak asasi manusia terhadap total kabupaten/kota yang berpartisipasi di wilayah, terdapat perubahan metode pengukuran target indikator kinerja, dimana pada tahun 2020-2023 target yang ditetapkan bersifat kuantitatif sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan bersifat kualitatif. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, realisasi indikator kinerja tidak relevan / belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja persentase kabupaten/kota peduli hak asasi manusia terhadap total kabupaten/kota yang berpartisipasi di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Salah satu faktor penyebab keberhasilan adalah dengan melakukan pendekatan melalui koordinasi dan komunikasi yang lebih aktif sehingga dapat memberikan motivasi dan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pemenuhan Indikator Penilaian Kab/kota Peduli HAM.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Rapat Persiapan Penginputan Laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi KKP HAM.
- Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM

d. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133,33%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten atau kota di Wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kabupaten atau kota di Wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}}$$

$$\text{Realisasi} = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase Kab atau Kota yang melaksanakan RANHAM}}{\text{Target persentase Kab atau Kota yang melaksanakan RANHAM}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{75\%} \times 100\% = 133,33\%$$

Berdasarkan hasil pantauan pada sistem SAPAHAM, terdapat 9 Pemerintah Daerah yaitu 1 Pemda Provinsi Banten dan 8 Pemda Kab/Kota di Wilayah Banten yang telah memenuhi pelaporan Aksi HAM dari total 9 Pemerintah Daerah yang berpartisipasi. Maka realisasi indikator kinerja yaitu sebesar 100%. Dengan target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, maka persentase capaian indikator kinerja tersebut telah tercapai sebesar 133,33%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	2	9	450%	75%	100%	133,33%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024

terdapat perubahan metode pengukuran target indikator kinerja, dimana pada tahun 2023 target yang ditetapkan bersifat kuantitatif sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan bersifat kualitatif. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024 karena adanya perbedaan formulasi pengukuran indikator kinerja sehingga tidak relevan. Jika dilihat dari persentase capaian indikator kinerja, capaian di tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023, namun persentase hasil capaian tahun 2024 tersebut telah sangat optimal karena telah melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	2	2	2	2	75%

Pada indikator kinerja persentase pelaksanaan ranham di kewilayahan, terdapat perubahan metode pengukuran target indikator kinerja, dimana pada tahun 2020-2023 target yang ditetapkan bersifat kuantitatif sedangkan pada tahun 2024 target yang ditetapkan bersifat kualitatif. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, realisasi indikator kinerja tidak relevan / belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024. Namun berdasarkan capaian indikator kinerja tahun 2024, hasil capaian indikator kinerja telah tercapai dengan sangat optimal yaitu sebesar 133,33%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung melalui pendekatan baik dengan melaksanakan koordinasi serta komunikasi yang lebih aktif sehingga dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pelaporan Aksi HAM.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan rapat evaluasi pelaporan capaian Aksi HAM tahun 2023 dan persiapan pelaporan capaian aksi ham tahun 2024
- Pelaksanaan koordinasi Aksi HAM ke seluruh Pemerintah Daerah di Wilayah Banten untuk mendorong Pemerintah Daerah melakukan pelaporan Aksi HAM sesuai dengan format dan data dukung yang diminta.

e. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33	3,87	116,22%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi hasil survey indeks kepuasan masyarakat atas layanan HAM di Wilayah}}{\text{Target indeks kepuasan masyarakat atas layanan HAM di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,87}{3,33} \times 100\% = 116,22\%$$

Penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahan dilaksanakan berdasarkan Survey 3AS melalui URL: <https://survey-bsk.kemenkumham.go.id> selama periode Januari – Desember 2024. Dari hasil survey tersebut, diketahui rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat periode Januari-Desember 2024 sebesar 3,87 indeks dengan jumlah responden sebanyak 611 responden. Berdasarkan target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 3,33 indeks, maka hasil capaian indikator kinerja telah tercapai 116,22% dan telah melampaui target yang ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Tidak ditargetkan	-	-	3,33	3,87	116,22%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	3,33

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di kewilayahan, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hak asasi manusia di kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung melalui koordinasi serta komunikasi yang lebih aktif dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder, pelaksanaan diseminasi dan edukasi, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Wilayah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan survei kepada seluruh pengguna layanan
- Pelaksanaan diseminasi dan edukasi tentang pemajuan dan penegakan HAM
- Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia

- a. Indikator Kinerja Kegiatan : **Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111,11%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi tindaklanjut rekomendasi produk hukum daerah berperspektif HAM}}{\text{Target tindaklanjut rekomendasi produk hukum daerah berperspektif HAM}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan penyusunan hasil Analisis Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM sebagai tindaklanjut dalam pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berperspektif HAM. Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%, maka hasil capaian indikator kinerja telah tercapai sebesar 111,11%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	Tidak ditargetkan	-	-	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	90%

Indikator kinerja persentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum

daerah yang disampaikan, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja persentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung melalui koordinasi serta komunikasi yang lebih aktif dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder, dan pelaksanaan diseminasi dan edukasi dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan rapat inventarisasi rancangan produk hukum dari perspektif HAM
- Pelaksanaan analisis rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM

DIVISI YANKUM – BADAN STRATEGI KEBIJAKAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Badan Strategi Kebijakan				110,00%
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah}}{\text{Target persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Pada tahun 2024, telah dihasilkan 3 analisis strategi kebijakan oleh Kantor Wilayah Banten diantaranya:

- Analisis evaluasi kebijakan tentang strategi implementasi terkait Permenkumham No. 20 tahun 2020
- Analisis kebijakan tentang kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif hukum positif
- Analisis strategi kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM

Seluruh hasil analisis kebijakan tersebut telah disampaikan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka realisasi indikator kinerja telah tercapai 100%. Mengacu kepada target indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian indikator kinerja tersebut sebesar 125%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti						

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, realisasi pada tahun 2024 sama dengan realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Berdasarkan target yang ditetapkan, capaian di tahun 2022 dan capaian di periode 2023 telah tercapai optimal yaitu mencapai 125%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60%	70%	80%	80%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2024 telah melampaui seluruh target yang ditetapkan dalam periode Renstra 2020-2024 dengan realisasi indikator kinerja ditahun 2024 yaitu sebesar 100% dan hasil capaian indikator kinerja tercapai sebesar 125%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia didukung oleh kerjasama dan peran aktif dari Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam pemenuhan data analisis kebijakan Hukum dan HAM.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia diantaranya:

- Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder yang berkaitan

dengan data kajian analisis kebijakan Hukum dan HAM

- Pengambilan dan pengumpulan data analisis kebijakan Hukum dan HAM
- Penyusunan hasil kajian analisis kebijakan Hukum dan HAM
- Pelaksanaan *forum group discussion* (FGD) dan rapat pembahasan hasil analisis kebijakan Hukum dan HAM.

DIVISI KEIMIGRASIAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	B	C	D	E=D/C
Keimigrasian				112,39%
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100,0%	111,11%
	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100,0%	111,11%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100,00%	111,11%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100,00%	100,00%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan	3,1	3,987	128,61%

1. Sasaran Kegiatan : Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100,0%	111,11%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi jumlah penegakan hukum Pro Yustisia yang ditangani}}{\text{Total penegakan hukum Pro Yustisia di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia yang ditangani}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia yang ditangani}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{90\%}{100\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Pada tahun 2024, terdapat 1 penanganan kasus penegakan hukum *Pro Yustisia* di Wilayah Banten yaitu pada Kantor Imigrasi Kls I Khusus Non TPI Tangerang dan saat ini telah diambil alih prosesnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tahap penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penanganan tersebut, maka realiasi atas indikator kinerja telah tercapai 100%. Mengacu kepada target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu sebesar 90%, maka persentase capaian indikator kinerja telah tercapai 111,11%. Rincian penegakan hukum Pro Yustisia di Wilayah Banten diuraikan sebagai berikut:

UPT	Asal WNA	Jenis Pelanggaran	Status Penanganan
Kanim Kls I Khusus Non TPI Tangerang	Srilangka	Penyalahgunaan Izin Tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a atau Pasal 123 huruf a, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Tahap penyidikan oleh Ditjen Imigrasi

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	Tidak ditargetkan	-	-	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	111,11%

Indikator kinerja Persentase Penegakan Hukum *Pro Yustisia* di Kewilayahan yang ditangani, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja persentase penegakan hukum *Pro Yustisia* di kewilayahan yang ditangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja persentase penegakan hukum *Pro Yustisia* di kewilayahan didukung atas pelaksanaan operasi bidang keamanan berupa Intelijen, Operasi Mandiri Pengawasan, Operasi Gabungan, *Pros Yustisia*, dan *Timpora*. Pada tahun 2024 telah terlaksana sebanyak 408 kegiatan operasi bidang keamanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Intelijen	Operasi Mandiri	Operasi Gabungan	Pro Yustisia	Timpora	Jumlah
1	Divisi Keimigrasian	32	16	7	0	2	57
2	Kanim Tangerang	8	184	3	1	3	199
3	Kanim Serang	47	37	5	0	4	63
4	Kanim Cilegon	17	38	2	0	2	59
	Jumlah	104	275	17	1	11	408

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja persentase penegakan hukum *Pro Yustisia* di kewilayahan diantaranya:

- Pelaksanaan Pengawasan, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian di Wilayah
- Pelaksanaan pendataan pengungsi luar negeri dan penjamin orang asing
- Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum setempat dalam pengawasan WNA di Wilayah
- Pelaksanaan pembinaan teknis Keimigrasian dalam rangka pengawasan dan pengendalian teknis Keimigrasian di Wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah penanganan TAK di Wilayah}}{\text{Total TAK di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{332}{332} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase penanganan TAK di Wilayah}}{\text{Target persentase penanganan TAK di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Pada tahun 2024 seluruh Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) di Wilayah Banten telah selesai ditangani dengan jumlah sebanyak 332 TAK, maka realisasi atas indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani telah tercapai 100%. Berdasarkan target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu sebesar 90%, maka persentase capaian indikator kinerja sebesar 111,11%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	Tidak ditargetkan	-	-	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	111,11%

Indikator kinerja persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, didukung atas pelaksanaan kegiatan penindakan Keimigrasian dengan jumlah 332 kegiatan ditahun 2024 dengan rincian:

No	Satuan Kerja	Deportasi	Cekal	Pedetensian	Total
1	Divisi Keimigrasian	0	3	0	3
2	Kanim Tangerang	132	104	19	255
3	Kanim Serang	16	9	1	17
4	Kanim Cilegon	27	3	27	57
	Total	175	119	47	332

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan Pengawasan, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian di Wilayah
- Pelaksanaan pendataan pengunjung luar negeri dan penjamin orang asing
- Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum setempat dalam pengawasan WNA di Wilayah
- Pelaksanaan pembinaan teknis Keimigrasian dalam rangka pengawasan dan pengendalian teknis Keimigrasian di Wilayah.

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

- a. Indikator Kinerja Kegiatan : **Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100,0%	111,11%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah layanan keimigrasian yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{191.041 \text{ layanan}}{191.041 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{90\%}{100\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Pada tahun 2024, seluruh layanan keimigrasian di Wilayah telah diselesaikan dengan jumlah sebanyak 191.041 layanan yang terdiri dari 171.795 layanan paspor dan 19.246 layanan ijin tinggal dengan total kontribusi PNBPN tahun 2024 sebanyak Rp 140.734.750.000. berdasarkan data tersebut, maka realisasi atas indikator kinerja tercapai sebesar 100%. Berdasarkan target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu sebesar 90%, maka persentase hasil capaian indikator kinerja telah tercapai sebesar 111,11%. Rincian layanan Keimigrasian dan total PNBPN tahun 2024 di Wilayah Banten diuraikan sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Paspur	Ijin Tinggal				Total
			ITK	ITAS	ITAP	Lain-lain	
1	Kanim Tangerang	114.137	2.190	7.398	592	1.255	125.572
2	Kanim Serang	41.102	1.896	2.642	23	910	46.573
3	Kanim Cilegon	16.556	143	952	13	1.232	18.896
	Total	171.795	4.229	10.992	628	3.397	191.041

No	Satuan Kerja	PNBP		Total
		Layanan Paspur	Layanan Ijin Tinggal	
1	Kanim Tangerang	Rp 65.018.350.000	Rp 32.331.700.000	Rp 97.350.050.000
2	Kanim Serang	Rp 22.017.800.000	Rp 9.145.550.000	Rp 31.163.350.000
3	Kanim Cilegon	Rp 9.109.550.000	Rp 3.111.800.000	Rp 12.221.350.000
	Total	Rp 96.145.700.000	Rp 44.589.050.000	Rp 140.734.750.000

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Tidak ditargetkan	-	-	90%	100%	111,11%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	111,11%

Indikator kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung atas pelaksanaan kemudahan Pelayanan Keimigrasian di Wilayah seperti layanan paspor online melalui M-Paspor, dan Kerjasama Layanan Keimigrasian dengan Instansi Pemerintah dan stakeholder terkait diantaranya:

- Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Pandeglang
- Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
- Unit Layanan Paspor di Mall WTC Serpong
- Pelayanan Paspor di Gerai Tangcity Mall Kota Tangerang
- Program Immigration Corner di Universitas Pelita Harapan
- Program Immigration Corner di Universitas Bina Nusantara
- Mall Pelayanan Publik di Kota Cilegon
- Mall Pelayanan Publik di Kab.Lebak

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja persentase penegakan hukum *Pro Yustisia* di kewilayahan diantaranya:

- Sosialisasi Perluasan pelayanan e-paspor
- Penambahan kuota e-paspor sebesar 80% dari aplikasi M-Paspor
- Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi dilingkungan Kantor Wilayah Banten
- Pembukaan Pelayanan Paspor DI MPP Lebak, Pandeglang, Cilegon dan Tangerang Selatan
- Pelayanan layanan Paspor di ULP Bintaro
- Layanan Eazy Paspor
- Sosialisasi dan uji coba Paspor Online kepada masyarakat dan stakeholder
- Pelaksanaan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah, akademisi, dan stakeholder untuk menyediakan layanan Keimigrasian
- Pelaksanaan pembinaan teknis Keimigrasian dalam rangka pengawasan dan pengendalian teknis Keimigrasian di Wilayah

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah UPT Imigrasi yang melaksanakan Rencana aksi RB}}{\text{Total UPT Imigrasi di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Pelaksanaan rencana aksi RB UPT Imigrasi}}{\text{Target Pelaksanaan rencana aksi RB UPT Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah UPT Imigrasi yang telah melaksanakan dan memenuhi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) tahun 2024. Berdasarkan hasil pemenuhan RKT-RB pada 3 UPT Imigrasi di Wilayah Banten bahwa seluruh UPT Imigrasi telah 100% memenuhi RKT-RB. Mengacu kepada target yang ditetapkan tahun 2024, maka persentase hasil capaian indikator kinerja telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	Tidak ditargetkan	-	-	100%	100%	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	100%

Indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini

dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi diantaranya :

- Penetapan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan RB.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta pendampingan secara berkala atas pemenuhan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada UPT di lingkungan Kantor Wilayah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung hasil pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Pelaksanaan penancangan dan komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Kantor Wilayah Banten
- Pelaksanaan rapat evaluasi setiap triwulan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan	3,1	3,987	128,61%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan UPT Imigrasi}}{\text{Target Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan UPT Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,987}{3,1} \times 100\% = 128,61\%$$

Realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil survei integritas pegawai pada 3 UPT Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah terkait layanan internal yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi: <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/> dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil rata-rata penilaian survei Integritas pada 3 UPT Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Banten periode Januari – Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Responden	Hasil Survei Integritas	
			Skala (100)	Konversi Skala 4
A	B	C	D	$E = \left(\frac{D}{100}\right) \times 4$
1	Kanim Tangerang	72	99,75	3,99
2	Kanim Serang	38	99,87	3,995
3	Kanim Cilegon	39	99,42	3,977
	Rata-rata		99,68	3,987

Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui nilai Integritas terkait layanan Kesekretariatan pada UPT Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu sebesar 3,987 (skala 4). Hasil capaian tersebut telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan target sebesar 3,1 indeks atau telah mencapai 128,61% dari target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan	Tidak ditargetkan	-	-	3,1	3,987	128,61%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	3,1

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan dikarenakan nilai survey yang optimal terhadap layanan-layanan internal, diantaranya :

- Tersedianya dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN, dan Kerumahtanggaan
- Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- Pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai
- Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung hasil pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja dan anggaran, pembinaan dan penguatan pembangunan Zona Integritas, serta Pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM.
- Optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran pada UPT Imigrasi.

DIVISI PEMASYARAKATAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

DIPA/PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
Pemasyarakatan				112,44%
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah	3,6	3,691	102,52%
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100,00%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan	3,1	3,98	128,39%

1. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah	3,6	3,691	102,52%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah}}{\text{Target Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,691}{3,6} \times 100\% = 102,52\%$$

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan atas indikator kinerja Indeks penegakan hukum Pemasyarakatan di wilayah yaitu sebesar 3,6 indeks (skala 4). Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan 8 dimensi indeks seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

No	Dimensi Penilaian (Indeks Skala 4)	Nilai Indeks	Bobot	Realisasi Indikator Kinerja
A	B	C	D	E=CxD
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	3,775	12,5%	3,691
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	3,778	12,5%	
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	4	12,5%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	4	12,5%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat di wilayah	3,424	12,5%	
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	3,301	12,5%	
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	3,869	12,5%	
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada Satuan Kerja Masyarakat di wilayah	3,998	12,5%	
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat			100%	

Berdasarkan perhitungan dari 8 dimensi indeks diatas, diketahui realisasi penilaian Indeks Penegakan Hukum Masyarakat yaitu sebesar 3,691 indeks. Mengacu kepada target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 3,6 indeks, realisasi indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 102,52%. Penjelasan hasil pengukuran indikator kinerja berdasarkan 8 dimensi indeks diatas, diuraikan sebagai berikut:

1.1. Indeks Pelayanan Tahanan di Wilayah

Pengukuran indeks pelayanan tahanan di Wilayah dihitung berdasarkan 5 variabel indikator. Hasil perhitungan nilai indeks pelayanan tahanan di Wilayah pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,775 indeks (skala 4) seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
1	% Penanganan <i>overstaying</i> tahanan	$\frac{2.658}{2.658} \times 100\% = 100\%$	50%	3,775
	$\frac{\text{jumlah tahanan yang tidak overstaying}}{\text{Total tahanan}} \times 100\%$			
2	% Tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum	$\frac{1.773}{1.773} \times 100\% = 100\%$	12,5%	
	$\frac{\text{jumlah penerima penyuluhan hukum}}{\text{Total permohonan penyuluhan hukum}} \times 100\%$			
3	% Pemohon bantuan hukum yang mendapatkan bantuan hukum	$\frac{479}{495} \times 100\% = 96,77\%$	12,5%	

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
	$\frac{\text{jumlah penerima bantuan hukum}}{\text{Total permohonan bantuan hukum}} \times 100\%$			
4	% Tahanan yang mendapatkan pelayanan jasmani $\frac{\text{jumlah tahanan mendapat pelayanan jasmani}}{\text{Total tahanan}} \times 100\%$	$\frac{2.064}{2.658} \times 100\% = 77,65\%$	12,5%	
5	% Tahanan yang mendapatkan pelayanan rohani $\frac{\text{jumlah tahanan mendapat pelayanan rohani}}{\text{Total tahanan}} \times 100\%$	$\frac{2.064}{2.658} \times 100\% = 77,65\%$	12,5%	

1.2. Indeks Pengelolaan Basan Baran di Wilayah

Pengukuran indeks pengelolaan Basan Baran di Wilayah dihitung berdasarkan 5 variabel indikator. Hasil perhitungan nilai indeks pengelolaan Basan Baran di Wilayah pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,778 indeks (skala 4) seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
1	% Pengadministrasian Basan pada Wilayah Kerja $\frac{\text{jumlah basan yang teradministrasi}}{\text{Jumlah basan pada wilayah kerja}} \times 100\%$	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	25%	
2	% Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi basan (cepat rusak, berbahaya, dan biaya penyimpanan terlalu tinggi sesuai amanat pasal 45 KUHAP dan pasal 21 Permenkumham no 16 tahun 2014 $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil penilaian dan klasifikasi}}{\text{Jumlah basan baran cepat rusak,berbahaya,dan biaya pemeliharaan tinggi}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = \text{Nihil}$	25%	
3	% Basan baran kehilangan/rusak (pencurian, perusakan, penukaran, atau keluarnya basan baran secara ilegal) $\frac{\text{jumlah basan baran hilang/rusak/ditukar}}{\text{jumlah basan baran pada wilayah kerja}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = \text{Nihil}$	16,67%	3,778
4	% Penyelamatan basan baran dalam kondisi darurat $\frac{\text{jumlah basan diselamatkan pada kondisi luar biasa}}{\text{Jumlah basan saat kejadian luar biasa}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = \text{Nihil}$	16,67%	
5	% Pengeluaran basan baran $\frac{\text{jumlah basan baran yang dikeluarkan}}{\text{jumlah basan baran berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$	$\frac{8}{12} \times 100\% = 66,67\%$	16,67%	

1.3. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Wilayah

Pengukuran indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah dihitung berdasarkan 4 variabel indikator. Hasil perhitungan nilai indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah pada tahun 2024 yaitu sebesar 4 indeks (skala 4) seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
1	% Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan	$\frac{5218}{5415} \times 100\% = 96,36\%$	25%	4
	$\frac{\text{jumlah napi yang memperoleh predikat baik}}{\text{Total napi yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$			
2	% Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	$\frac{4}{8} \times 100\% = 50\%$	25%	
	$\frac{\text{jumlah napi yang memperoleh predikat sadar, patuh, disiplin}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$			
3	% Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	$\frac{256}{320} \times 100\% = 80\%$	25%	
	$\frac{\text{jumlah napi yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Total napi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$			
4	% Narapidana yang bekerja	$\frac{471}{256} \times 100\% = 183,9\%$	25%	
	$\frac{\text{jumlah napi yang bekerja}}{\text{total napi yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$			

1.4. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

Pengukuran indeks pemenuhan hak narapidana dihitung berdasarkan 2 variabel indikator. Hasil perhitungan indeks pemenuhan hak narapidana di Wilayah pada tahun 2024 yaitu sebesar 4 indeks (skala 4) seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
1	% Pemenuhan Hak Remisi	$\frac{12.616}{12.616} \times 100\% = 100\%$	50%	4
	$\frac{\text{jumlah napi dan anak binaan yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{jumlah napi dan anak binaan yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$			
2	% Pemenuhan Hak Integrasi	$\frac{2.276}{2.276} \times 100\% = 100\%$	50%	
	$\frac{\text{jumlah napi dan anak binaan yang mendapat hak integrasi (PB,CB,CMB)}}{\text{jumlah napi dan anak binaan yang diusulkan memperoleh hak integrasi dan memenuhi syarat}} \times 100\%$			

- 1.5. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan di Wilayah
Pengukuran indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah dihitung berdasarkan 1 variabel indikator. Hasil perhitungan indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,424 indeks (skala 4) seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
1	% Klien Pemasarakatan yang sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas $\frac{\text{jumlah klien Pemasarakatan yang siap melanjutkan hidup pasca bebas}}{\text{total klien Pemasarakatan}} \times 100\%$	$\frac{3.913}{4.572} \times 100\% = 85,6\%$	100%	3,424

- 1.6. Indeks Pembinaan Khusus Anak di Wilayah

Pengukuran indeks pembinaan khusus anak di Wilayah dihitung berdasarkan 2 variabel indikator. Hasil perhitungan indeks pembinaan khusus anak di wilayah pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,301 indeks (skala 4) seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
1	% Anak binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal $\frac{\text{jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan}}{\text{jumlah anak binaan di LPKA}} \times 100\%$	$\frac{80}{123} \times 100\% = 65,04\%$	50%	3,301
2	%Anak binaan yang memperoleh pelatihan ketrampilan $\frac{\text{jumlah anak binaan yang mengikuti pelatihan ketrampilan}}{\text{jumlah anak binaan di LPKA}} \times 100\%$	$\frac{123}{123} \times 100\% = 100\%$	50%	

- 1.7. Indeks derajat kesehatan anak, tahanan, narapidana di Wilayah

Pengukuran indeks derajat kesehatan anak, tahanan, narapidana di Wilayah dihitung berdasarkan 12 variabel indikator. Hasil perhitungan indeks derajat kesehatan anak, tahanan, narapidana di Wilayah pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,869 indeks (skala 4) seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
1	% Narapidana dan anak binaan yang memiliki status gizi dengan kategori baik	$\frac{7071}{9245} \times 100\% = 76,48\%$	5%	3,869

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
	terhadap total responden			
	$\frac{\text{jumlah napi dan anak binaan dengan status gizi kategori baik}}{\text{jumlah napi dan anak binaan yang menjadi responden}} \times 100\%$			
2	% Tahanan/narapidana/anak yang menjalankan pola hidup sehat sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total responden	$\frac{7652}{9245} \times 100\% = 82,77\%$	5%	
	$\frac{\text{jumlah WBP yang menjalankan hidup sehat}}{\text{Total responmden}} \times 100\%$			
3	% Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total Lapas, Rutan, dan LPKA	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	5%	
	$\frac{\text{jumlah LP,Rutan,LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan}}{\text{Total LP,Rutan,LPKA}} \times 100\%$			
4	% Narapidana dan Anak binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden	$\frac{7735}{9245} \times 100\% = 100\%$	5%	
	$\frac{\text{jumlah napi dan anak binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup}}{\text{Total napi dan anak binaan yang menjadi responden}} \times 100\%$			
5	% Tindakan pengendalian penyakit menular terhadap total kasus penyakit menular yang pernah terjadi	$\frac{113}{113} \times 100\% = 100\%$	5%	
	$\frac{\text{jumlah tindakan pengendalian penyakit menular}}{\text{Total kasus penyakit menular yang pernah terjadi}} \times 100\%$			
6	% Tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap total responden	$\frac{9245}{9245} \times 100\% = 100\%$	5%	
	$\frac{\text{jumlah WBP mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala}}{\text{Total responden}} \times 100\%$			
7	% tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan imunisasi/vaksin sesuai kebutuhan terhadap total responden	$\frac{9245}{9245} \times 100\% = 100\%$	5%	
	$\frac{\text{jumlah WBP yang mendapatkan imunisasi atau vaksin sesuai kebutuhan}}{\text{Total responden}} \times 100\%$			
8	% Tahanan/narapidana/anak yang mendapat obat pencegahan masal sesuai kebutuhan terhadap total responden	$\frac{9245}{9245} \times 100\% = 100\%$	5%	
	$\frac{\text{jumlah WBP yang mendapatkan obat pencegahan massal sesuai kebutuhan}}{\text{Total responden}} \times 100\%$			
9	% fasilitasi layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitasi layanan kesehatan	$\frac{11}{12} \times 100\% = 91,66\%$	5%	

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
	diseluruh Rutan/Lapas/LPKA yang menjadi sampel			
	$\frac{\text{jumlah fasilitas layanan kesehatan berizin}}{\text{total fasilitas layanan kesehatan pada LP Rutan,LPKA yang menjadi sample}} \times 100\%$			
10	% Pasien tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat terhadap total responden	$\frac{9245}{9245} \times 100\% = 100\%$	5%	
	$\frac{\text{jumlah WBP yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat}}{\text{Total responden}} \times 100\%$			
11	% Pasien tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan penanganan penyakit terhadap total responden yang sakit	$\frac{5217}{5217} \times 100\% = 100\%$	25%	
	$\frac{\text{jumlah WBP yang mendapatkan penanganan penyakit}}{\text{Total responden yang sakit}} \times 100\%$			
12	% Pasien tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif terhadap total pasien yang mengalami sakit paru-paru kronis, Hypertensi, DM, Jantung, Gangguan Mental, Rehabilitasi Narkotika	$\frac{489}{489} \times 100\% = 100\%$	25%	
	$\frac{\text{jumlah WBP yang mendapatkan tindakan rehabilitatif}}{\text{Total responden}} \times 100\%$			

1.8. Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah Pengukuran indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah dihitung berdasarkan 10 variabel indikator. Hasil perhitungan indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja Pemasarakatan di Wilayah pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,998 indeks (skala 4) seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(CxD)x4
1	% Kemampuan deteksi dini			
	$\frac{\text{jumlah LP,Rutan,LPKA yang berhasil meningkatkan status}}{\text{Total LP,Rutan,LPKA}} \times 100\%$	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	10%	
2	% Kesiapsiagaan/mitigasi bencana alam			
	$\frac{\text{jumlah LP,Rutan,LPKA yang memiliki rencana kontijensi penanganan bencana alam}}{\text{Total LP,Rutan,LPKA}} \times 100\%$	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	10%	3,869
3	% Penggagalan upaya tindak pidana		10%	

No	Indikator indeks & Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Bobot	Nilai Indeks (Skala 4)
A	B	C	D	E=(Cx4)
	$\frac{\text{jumlah kasus pengggagalan tindak kriminal WBP oleh petugas}}{\text{jumlah kejadian tindak kriminal WBP}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$		
4	% Penggeledahan blok hunian $\frac{\text{jumlah LP,Rutan,LPKA yang melaksanakan penggeledahan sesuai standar}}{\text{Total LP,Rutan,LPKA}} \times 100\%$	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	10%	
5	% Pelaksanaan tes urin WBP $\frac{\text{jumlah tes urin WBP dengan hasil negatif}}{\text{jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan pada WBP}} \times 100\%$	$\frac{657}{660} \times 100\% = 99,54\%$	10%	
6	% Pelaksanaan tes urin Petugas $\frac{\text{jumlah tes urin petugas masyarakat dengan hasil negatif}}{\text{jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan pada petugas masyarakat}} \times 100\%$	$\frac{517}{517} \times 100\% = 100\%$	10%	
7	% Penanganan gangguan Kamtib $\frac{\text{jumlah gangguan kamtib yang berhasil ditangani}}{\text{total gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	10%	
8	% UPT yang melakukan pemulihan pasca gangguan Kamtib dan bencana alam $\frac{\text{jumlah UPT Masyarakat yang melakukan pemulihan hingga kondusif}}{\text{jumlah UPT Masyarakat yang mengalami gangguan kamtib serta bencana alam}} \times 100\%$	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	10%	
9	% Tindakan lanjut pengaduan sesuai standar $\frac{\text{jumlah penyelesaian pengaduan sesuai standar}}{\text{jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	10%	
10	% Penegakan kode etik $\frac{\text{jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar}}{\text{jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = \text{Nihil}$	10%	

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah	Tidak ditargetkan	-		3,6	3,691	102,52%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	3,6

Indikator kinerja indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah diantaranya:

- Tidak adanya tahanan overstaying pada akhir tahun 2024
- Pelaksanaan penyuluhan hukum pada 1.773 tahanan dan pelaksanaan bantuan hukum pada 479 tahanan
- Pemeliharaan basan baran telah dikelola sangat baik dengan jumlah 17 register dengan nilai taksiran sebesar Rp 4.261.206.027
- Pelaksanaan pembinaan kepada narapidana dengan hasil penilaian berdasarkan SPPN diketahui sebanyak 5.218 WBP yang memperoleh nilai baik dan sangat baik
- Pelaksanaan sumpah ikrar setia NKRI kepada 4 Narapidana Risiko Tinggi (Narapidana Terorisme)
- Pelaksanaan pelatihan Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kepada 256 WBP
- Jumlah narapidana bekerja dan produktif sebanyak 471 orang
- Pemenuhan hak remisi telah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2024 dengan jumlah 12.616 remisi
- Pemenuhan seluruh usul hak integrasi narapidana dengan jumlah 2.276 hak

integrasi

- Keberhasilan pembimbingan kemandirian dan kepribadian kepada Klien Pemasarakatan dengan jumlah sebanyak 3.913 klien telah siap melanjutkan hidup pasca bebas
- Pelaksanaan Pendidikan formal dan non formal kepada 80 anak binaan di LPKA
- Pelaksanaan layanan kesehatan kepada seluruh WBP
- Seluruh LP/LPKA/Rutan telah melaksanakan deteksi dini, dan kesiapsiagaan/mitigas bencana alam.
- Keberhasilan kegagalan 6 upaya tindak pidana oleh WBP di LP/LPKA/Rutan
- Pelaksanaan penggeledahan di LP/LPKA/Rutan sebanyak 392 kali
- Pelaksanaan tes urine kepada 517 petugas pemsarakatan dan 660 WBP pada LP/LPKA/Rutan
- Keberhasilan penanganan gangguan Kamtib pada LP/LPKA/Rutan
- Penyelesaian dan tindaklanjut pengaduan masyarakat pada UPT Pemsarakatan dengan jumlah 12 pengaduan

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja diantaranya:

- Pelaksanaan pelayanan tahanan
- Pengelolaan Basan baran
- Pelaksanaan pembinaan kemandirian dan kepribadian WBP
- Pemenuhan Hak Narapidana
- Program pembimbingan klien pemsarakatan di Wilayah
- Pelaksanaan dan pemenuhan layanan Kesehatan WBP
- Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas gangguan Keamanan dan Ketertiban pada UPT Pemsarakatan
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemsarakatan
- Pelaksanaan BINTORWASDAL Pemsarakatan secara rutin pada seluruh UPT Pemsarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Banten.
- Penyelenggaraan DILKUMJAKPOL dan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemsarakatan di Wilayah

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup UPT Pemsarakatan

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemsarakatan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan Rencana aksi RB}}{\text{Total UPT Pemasarakatan di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Pelaksanaan rencana aksi RB UPT Pemasarakatan}}{\text{Target Pelaksanaan rencana aksi RB UPT Pemasarakatan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah UPT Pemasarakatan yang telah melaksanakan dan memenuhi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) tahun 2024. Berdasarkan hasil pemenuhan RKT-RB pada 16 UPT Pemasarakatan di Wilayah Banten bahwa seluruh UPT Pemasarakatan telah 100% memenuhi RKT-RB. Mengacu kepada target yang ditetapkan tahun 2024, maka persentase hasil capaian indikator kinerja telah tercapai 100%.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Tidak ditargetkan	-	-	100%	100%	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	100%

Indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di

lingkup UPT Pemasarakatan, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan diantaranya :

- Penetapan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan RB.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta pendampingan secara berkala atas pemenuhan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada UPT di lingkungan Kantor Wilayah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung hasil pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Pelaksanaan penancangan dan komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Kantor Wilayah Banten
- Pelaksanaan rapat evaluasi setiap triwulan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretariatan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretariatan	3,1	3,98	128,39%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan UPT Masyarakat}}{\text{Target Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan UPT Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,98}{3,1} \times 100\% = 128,39\%$$

Realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil survei integritas pegawai pada 16 UPT Masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah tentang layanan Kesekretariatan yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi: <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/> dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil rata-rata penilaian survei Integritas pada 16 UPT Masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Banten periode Januari – Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Responden	Hasil Survei Integritas	
			Skala (100)	Konversi Skala 4
A	B	C	D	$E = \left(\frac{D}{100}\right) \times 4$
1	LP Kls I Tangerang	124	99,26	3,970
2	LP Pemuda Tangerang	53	95,55	3,822
3	LP Perempuan Tangerang	82	99,95	3,998
4	LPKA Tangerang	82	99,99	4,000
5	LP Kls IIA Tangerang	75	99,95	3,998
6	LP Serang	-	-	-
7	LP Cilegon	110	99,99	4,000
8	LP Rangkasbitung	55	100,00	4,000
9	LP Terbuka Ciangir	-	-	-
10	Rutan Tangerang	141	99,37	3,975
11	Rutan Serang	76	99,99	4,000
12	Rutan Pandeglang	59	99,99	4,000
13	Bapas Tangerang	67	100,00	4,000
14	Bapas Serang	53	99,92	3,997
15	Bapas Ciangir	11	100,00	4,000
16	Rupbasan Serang	24	99,06	3,962
Rata-rata			99,50	3,98

Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui nilai Integritas terkait layanan kesekretariatan pada UPT Masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Banten yaitu sebesar 3,98 (skala 4). Hasil capaian tersebut telah melampaui target kinerja

yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 3,1 indeks atau telah mencapai 128,39% dari target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretariatan	Tidak ditargetkan	-	-	3,1	3,98	128,39%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024, pada tahun 2023 indikator kinerja tersebut tidak ditargetkan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis di tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja pada tahun 2024. Maka dari itu, indikator kinerja tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretariatan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	Tidak ditargetkan	3,1

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretariatan, tidak ditargetkan pada periode tahun 2020-2023 hal ini dikarenakan terdapat perubahan lingkungan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut belum dapat dibandingkan berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretariatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT

Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan dikarenakan nilai survey yang optimal terhadap layanan-layanan internal, diantaranya :

- Tersedianya dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN, dan Kerumahtanggaan
- Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- Pemenuhan data dan peningkatan kompetensi pegawai
- Terpenuhi sarana dan prasarana perkantoran

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung hasil pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja dan anggaran, pembinaan dan penguatan pembangunan Zona Integritas, serta Pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM.
- Optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran pada UPT Pemasyarakatan.

REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
	Kantor Wilayah Banten	425.546.833.000	372.062.480.336	87,43%
1	Setjen – Dukungan Manajemen	20.647.080.000	20.545.214.353	99,51%
2	Administrasi Hukum Umum	2.838.178.000	2.837.205.793	99,97%
3	Kekayaan Intelektual	2.374.578.000	2.373.782.376	99,97%
4	Peraturan Perundang-undangan	498.635.000	498.634.000	100,00%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	2.257.696.000	2.254.532.312	99,86%
6	Hak Asasi Manusia	251.447.000	251.447.000	100,00%
7	Badan Strategi Kebijakan	249.259.000	249.259.000	100,00%
8	Imigrasi	103.725.959.000	51.404.426.827	49,56%
	a. Divisi Imigrasi	2.447.456.000	2.444.540.185	99,88%
	b. Kanim Tangerang	27.680.372.000	27.020.990.376	97,62%
	c. Kanim Cilegon	12.198.447.000	12.047.829.287	98,77%
	d. Kanim Serang	61.399.684.000	9.891.066.979	16,11%
9	Pemasyarakatan	284.678.792.000	291.647.978.675	99,64%
	a. Divisi Pemasyarakatan	1.396.956.000	1.335.013.381	95,57%
	b. LP Kls I Tangerang	90.499.230.000	90.403.545.232	99,89%
	c. LP Pemuda Tangerang	42.962.409.000	42.952.219.986	99,98%
	d. LP Perempuan Tangerang	10.360.020.000	10.316.486.494	99,58%
	e. LP Kls IIA Tangerang	19.738.254.000	19.693.788.685	99,77%
	f. LPKA Tangerang	10.581.300.000	10.484.972.472	99,09%
	g. LP Terbuka Ciangir	4.800.827.000	4.795.574.218	99,89%
	h. LP Serang	16.282.467.000	16.174.160.304	99,33%
	i. LP Cilegon	25.723.369.000	25.659.633.399	99,75%
	j. LP Rangkasbitung	7.411.282.000	7.381.092.965	99,59%

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	B	C	D	E=D/C
	k. Rutan Tangerang	25.992.259.000	25.752.885.610	99,08%
	l. Rutan Serang	12.288.271.000	12.245.884.404	99,66%
	m. Rutan Pandeglang	7.632.856.000	7.616.711.231	99,79%
	n. Bapas Tangerang	6.754.476.000	6.667.516.260	98,71%
	o. Bapas Serang	5.034.509.000	5.023.887.733	99,79%
	p. Bapas Ciangir	3.045.725.000	2.987.601.990	98,09%
	q. Rupbasan Serang	2.199.791.000	2.157.004.311	98,05%

Berdasarkan data pada tabel yang telah disajikan, diketahui bahwa realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten belum tercapai optimal dengan realisasi sebesar 87,43%. Hal ini dikarenakan terdapat kebijakan Auto Adjustment (Blokir) anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor pada Kantor Imigrasi Serang yaitu sebesar Rp 50.888.054.000,- atau sebesar 11,96% dari total anggaran Kantor Wilayah Banten tahun 2024. Kebijakan tersebut juga berdampak terhadap kurang optimalnya realisasi anggaran Imigrasi dengan persentase realisasi anggaran Imigrasi di tahun 2024 sebesar 49,56%.

Kantor Wilayah Banten juga telah melakukan upaya dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan permohonan agar pagu anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor pada Kanim Serang yang telah diblokir agar dapat dibuka blokir anggarannya. Akan tetapi jika tidak dapat dibuka proses blokir anggarannya, Kantor Wilayah mengajukan agar pagu anggaran tersebut dapat ditarik ke pagu anggaran Unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dapat dilakukan optimalisasi anggaran di level Unit Eselon I. Namun hingga akhir periode tahun 2024, pagu anggaran belanja modal tersebut masih dalam status blokir dan tidak ditarik oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga berdampak pada kurang optimalnya realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Banten.

**REALISASI ANGGARAN YEAR ON YEAR (YoY)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

No	Dipa	Realisasi Anggaran					
		2022		2023		2024	
		Pagu	(%)	Pagu	(%)	Pagu	(%)
A	Kantor Wilayah Banten	350.701.938.000	98,31%	354.654.096.000	99,25%	425.546.833.000	87,43%
1	Setjen - Dukungan Manajemen	16.598.879.937	99,59%	23.215.698.000	99,96%	20.647.080.000	99,51%

No	Dipa	Realisasi Anggaran					
		2022		2023		2024	
		Pagu	(%)	Pagu	(%)	Pagu	(%)
2	Administrasi Hukum Umum	1.964.034.532	99,93%	2.260.316.000	99,98%	2.838.178.000	99,97%
3	Kekayaan Intelektual	1.054.645.682	99,83%	1.730.303.000	99,88%	2.374.578.000	99,97%
4	Peraturan Perundang-undangan	262.000.000	100%	373.635.000	100,00%	498.635.000	100%
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	1.714.585.949	99,35%	2.511.020.000	99,67%	2.257.696.000	99,86%
6	Hak Asasi Manusia	224.982.000	100%	235.484.000	100,00%	251.447.000	100%
7	Badan Strategi Kebijakan	180.218.000	100%	219.371.000	100,00%	249.259.000	100%
8	Imigrasi	31.901.556.065	88,80%	39.429.477.000	97,16%	103.725.959.000	49,56%
9	Pemasyarakatan	290.867.108.592	99,38%	284.678.792.000	99,47%	292.704.001.000	99,64%

Selanjutnya, jika melihat realisasi anggaran secara *year on year (yoy)* realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada 2024 yaitu sebesar 87,43% mengalami koreksi sebesar -11,82% dibandingkan realisasi anggaran periode tahun 2023 yaitu sebesar 99,25%. Koreksi tersebut disebabkan adanya kebijakan Auto Adjustment (Blokir) anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor pada Kantor Imigrasi Serang yaitu sebesar Rp 50.888.054.000,- atau sebesar 11,96% dari total anggaran Kantor Wilayah Banten tahun 2024 sehingga realisasi anggaran tahun 2024 lebih rendah dibanding realisasi anggaran tahun 2023.

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	DIPA	NILAI PERENCANAAN ANGGARAN	NILAI IKPA	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN (%)
A	B	C	D	$E = \frac{C+D}{2}$
	Kantor Wilayah Banten	94,02	97,88	95,95
1	Setjen - Dukungan Manajemen	78,34	99,68	89,01
2	Administrasi Hukum Umum	100,00	100,00	100,00
3	Kekayaan Intelektual	100,00	97,04	98,52
4	Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00
5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	92,08	92,3	92,19
6	Hak Asasi Manusia	100,00	98,59	99,30
7	Badan Strategi Kebijakan	100,00	97,62	98,81
8	Imigrasi	84,37	94,93	89,65
	Divisi Imigrasi	83,00	100,00	91,50
	Kanim Tangerang	83,98	93,84	88,91
	Kanim Cilegon	87,50	95,98	91,74
	Kanim Serang	83,00	89,89	86,45
9	Pemasyarakatan	95,57	98,56	97,07
	Divisi Pemasyarakatan	100,00	97,49	98,75
	LP Kelas I Tangerang	100,00	97,17	98,59
	LP Kelas IIA Pemuda Tangerang	100,00	100,00	100,00
	LP Perempuan Kelas IIA Tangerang	100,00	100,00	100,00
	LP Kelas IIA Tangerang	100,00	97,84	98,92
	LPKA Kelas I Tangerang	100,00	99,13	99,57
	LP Terbuka Ciangir	100,00	98,94	99,47
	LP Kelas II Serang	91,66	99,20	95,43
	LP Kelas IIA Cilegon	100,00	100,00	100,00

NO	DIPA	NILAI PERENCANAAN ANGGARAN	NILAI IKPA	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN (%)
A	B	C	D	$E = \frac{C+D}{2}$
	LP Kelas III Rangkasbitung	95,35	100,00	97,68
	Rutan Kelas I Tangerang	92,31	95,56	93,94
	Rutan Kelas IIB Serang	91,66	98,3	94,98
	Rutan Kelas IIB Pandeglang	100,00	100,00	100,00
	Bapas Tangerang	88,52	96,82	92,67
	Bapas Kelas II Serang	94,05	98,26	96,16
	Bapas Kelas II Ciangir	83,71	98,97	91,34
	Rupbasan Kelas II Serang	87,50	97,91	92,71

Kemudian dari data kinerja anggaran yang telah disajikan, diketahui bahwa Nilai Perencanaan Anggaran dilingkungan Kantor Wilayah Banten (28 DIPA) pada periode tahun 2024 yaitu sebesar 94,02, sedangkan untuk nilai IKPA di tahun 2024 yaitu sebesar 97,88. Pengukuran capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Banten dihitung berdasarkan nilai Perencanaan Anggaran dengan bobot sebesar 50% dan nilai IKPA dengan bobot sebesar 50%. Berdasarkan data yang disampaikan, maka hasil capaian kinerja anggaran Kantor Wilayah Banten pada periode tahun 2024 telah tercapai sebesar 95,95.

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. CAPAIAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, seluruh unit kerja mengemban target rencana aksi percepatan perjanjian kinerja pada tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan unit eselon 1. Hasil capaian pemenuhan target rencana aksi percepatan perjanjian kinerja yang diemban Kantor Wilayah Banten pada tahun 2024 telah terpenuhi 100% seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
SEKRETARIAT JENDERAL				
1	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik	Januari - Februari	Pendampingan penyusunan LKJIP	100%
2	Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan	Januari-Februari	Pemutakhiran Data 2023 Indikator: (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	100%
		Januari-Februari	Pemetaan Data 2025 (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	100%
		Januari - Desember	Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham minimal 25% pegawai per triwulan (Januari s/d Desember)	100%
3	Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA	April - Juni	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024.	100%
		Juli - September	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	100%
		Oktober - November	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024.	
4	Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN	Juni - Juli	Kantor Wilayah melakukan pendampingan Pra Penyusunan RKBMN	100%
5	Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan	Januari dan Juli	Menyusun Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	100%
6	Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Januari	Membuat SK Tim Pengawasan	100%
		Januari - Juni	Implementasi pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE	100%
		Juli - Desember	Monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	100%
7	Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham 30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Simdatin	100%
		Maret-Juni	Melaksanakan rekomendasi hasil verifikasi dan uji kelaikan keamanan oleh Pusdatin	100%
INSPEKTORAT JENDERAL				
1	Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham	Triwulan	Laporan Triwulanan evaluasi pelaksanaan dari Kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Itjen	100%
		Triwulan	Evaluasi Triwulanan oleh Itjen	100%
		Triwulan	Penyampaian laporan di Minggu pertama setiap triwulan	100%
2	Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK	Sepanjang tahun	Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi Satker yang diputar setiap hari (Berupa rekaman tentang budaya integritas)	100%
		Triwulan I	Tindak lanjut hasil SPI 2023	100%
		Triwulan II	a. Penetapan responden eksternal dan internal yang tepat b. Sosialisasi kepada responden eksternal	100%
		Triwulan III	Pelaksanaan Survei oleh KPK	100%
		Triwulan III	Hasil survei	100%
DITJEN PP				
1	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang	Januari	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi dan	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
	berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.		SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	
		Februari	Melakukan koordinasi kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemda Provinsi /Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	100%
		Maret-November	Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPPDAH)	100%
		Desember	Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah	100%
DITJEN HAM				
1	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	Januari	Rapat Koordinasi terkait persiapan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM	100%
		Februari	Rapat penyusunan draft SK GTD BHAM	100%
		Maret	Pengukuhan GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023	100%
		April	Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	100%
		Mei	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	100%
		Juni	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	100%
		Juli	1.a. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	100%
		Agustus	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	100%
	September	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	100%	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA 3. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	
		Oktober	1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	100%
		November	1. Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM Daerah 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	100%
		Desember	1. Penyampaian Laporan Monev dan Tindak Lanjut Aksi serta Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	100%
BPHN				
1	Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/ partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb)	Maret	1. Rapat persiapan 2. Surat usulan penyampaian Desa/ Kelurahan yang akan dijadikan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum Binaan disetiap wilayah	100%
		Juni	1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum di masing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 3. Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Akses informasi Hukum	100%
		September	1. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 3. Implementasi kuesioner Indeks Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			Keadilan, Dimensi Akses Demokrasi	
		Desember	Menyusun laporan capaian target Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan dimasing-masing wilayah dan rencana usulan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan tahun berikutnya	100%
2	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksana lainnya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasi secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH. Berdasarkan Indeks Kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan PBH kepada Penerima Bantuan Hukum yang dihasilkan melalui wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan nilai persepsi atas pelayanan bantuan hukum yang diterimanya, pada tahun 2023 baru dilakukan penilaian kinerja PBH sebanyak 506 PBH dari 619 PBH atau sebesar 81.7 %. Sehingga penilaian kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan.	Juni	25% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	100%
		September	50% (B06: 25% + B09: 25%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	100%
		Desember	85% (B09: 50% + B12: 35%)Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	100%
3	Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun	Maret	Penunjukkan Pokjada Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	100%
		Juni	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH baru)	100%
		September	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
	2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.			
4	Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase over capacity sebesar 109%. Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya terjadi peningkatan signifikan akan volume perkara dari tahun ke tahun dan hal ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah Hakim dan ASN baik di daerah maupun di pusat. Hal ini berdampak pada peningkatan beban kerja Hakim dan ASN di lingkungan peradilan serta prosentase penyelesaian perkara di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, penting peran Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai dalam penyelesaian konflik di desa/kelurahan atau berperan sebagai Paralegal. Peran kepala desa/lurah bukan saja memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal untuk menjalankan urusan-urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi secara informal menjadi tokoh sentral yang dipatuhi oleh warganya, dan diharapkan menjadi pengayom yang	Maret	Sosialisasi <i>Paralegal Justice Award</i>	100%
		Juni	Pelaksanaan seleksi <i>Paralegal Justice Award</i>	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
	<p>dapat melindungi berbagai kepentingan desa dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan serta konflik yang terjadi. Kepala desa/lurah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan desa/kelurahan, memiliki kedudukan dan peran yang sangat sentral dan strategis untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya, sehingga tercipta suasana yang harmoni, damai dan rukun di kalangan warganya. Hal ini juga sejalan dengan peran Kepala Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat desa dan menyelesaikan perselisihan Masyarakat di desa. Peran Lurah sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diberikan penguatan kompetensi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan sebagai Paralegal untuk melaksanakan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban serta lebih khususnya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa agar dapat mengurangi perselisihan faham antara penduduk desa yang akan berujung pada proses hukum litigasi yang Panjang dan rumit melalui apresiasi Paralegal Justice Award.</p>			
DITJEN AHU				
1	Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia	Maret - November	Penyebaran informasi terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai masa di wilayah	100%
2	Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum	Januari - Maret	Kantor Wilayah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk kemudian dilakukan	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
	Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		sinkronisasi dengan database Ditjen AHU	
		Mei - Desember	Implementasi Migrasi Data Notaris	100%
DITJEN KI				
1	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis	Maret	1. Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah 2. Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat 3. Identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis	100%
		Agustus	1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil/ Gubernur 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah	100%
		September	Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal 1 permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses	100%
		Desember	1. Berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk	100%
2	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif	Februari - Juni	Diseminasi Merek Kolektif	100%
		Juli s.d Nov	Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif 1 wilayah 1 merek kolektif	100%
		Desember	Monitoring dan evaluasi	100%
3	Persiapan kerja sama kearah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara	Triwulan 1-2	1) Persiapan penjajakan dengan mitra forum Gugug Tugas IG; 2) Pembentukan Gugus Tugas	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
	Bappenas dengan pemerintah daerah --> diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah		Indikasi Geografis sebagai forum koordinasi antara stakeholder lintas Kementerian/Lembaga/Pemda untuk mendorong pendaftaran IG dari wilayah	
4	Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi	Januari - Februari	Januari - Februari Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	100%
		Maret - Agustus	Maret - Agustus Pelaksanaan kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	100%
		September	September Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	100%
5	Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digrant yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten)	Maret - April	Maret - April Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	100%
		Mei - Oktober	Mei - Oktober Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	100%
		November	November Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	100%
6	Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri	Januari	B01 : - koordinasi dengan Stakeholder terkait - Membentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim	100%
		Februari	B02 : - Koordinasi DJKI dan Kanwil Kumham secara virtual, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri - Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	100%
		Maret	B03 : - Melaksanakan rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri - Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	100%
		April-Mei	B04 – B05 : - Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan diwilayah masing-masing	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			- Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	
		Juni-Juli	B06 – B07 : - Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif - Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	100%
		Agustus-September	B08 – B09 : - Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor pendidikan - Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	100%
		Oktober	B10 : - Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor asosiasi pengusaha atau industri - Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	100%
		November	B11 : - Menyampaikan hasil inventarisasi potensi desain industri ke DJKI - Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	100%
BSK				
1	Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH belum optimal	Januari - Februari	Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah	100%
		Maret	Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	100%
		April- Agustus	1. Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	100%
		November-Desember	Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	100%
DITJEN IMIGRASI				
1	Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.	Januari - Maret	1. Rapat Persiapan Perluasan pelayanan e-paspor 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Rapat Pembahasan	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Sosialisasi Perluasan pelayanan e-paspor	
		April - Juni	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Juli - September	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Oktober - Desember	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
2	Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi	Januari-Maret	1. Melakukan pemetaan analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	100%
		April-Juni	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Juli-September	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Oktober - Desember	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
3	Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara	Januari-Desember	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat (<i>awareness</i>) melalui pengayaan (<i>enrichment</i>) fungsi desa binaan imigrasi	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	
4	Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	Januari-Maret	1. Penetapan target sasaran 2. Penetapan pengendalian petugas	100%
		April-Juni	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	100%
		Juli-September	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	100%
		Oktober - Desember	Evaluasi pelaksanaan tugas	100%
DITJEN PEMASYARAKATAN				
1	Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah	Januari Februari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	100%
			2) Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	100%
			3) Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif	100%
			1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (pilloting)	100%
		Maret	1) -Sosialisasi terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di UPT Piloting	100%
		April	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah pilloting oleh Balai Pemasyarakatan;	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	100%
		Mei	1)- Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK yang mel di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait.	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	100%
		Juni	1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah pilloting;.	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	100%
		Juli	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	100%
		Agustus	1) Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan:	
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	100%
		September	1) - Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	100%
		Oktober	1) - Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	100%
		November	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap	100%

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		PEMENUHAN (%)
			Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	
		Desember	1) Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan;	100%
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	100%
			3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	100%

2. CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Banten mengemban Program Prioritas Nasional yaitu Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Program Prioritas Nasional tersebut diemban pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kantor Wilayah Banten. Target Rincian Output (RO) yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu untuk Bantuan Hukum Litigasi sejumlah 197 orang dan Bantuan Hukum Non Litigasi sejumlah 23 kegiatan.

Selanjutnya, hasil capaian program prioritas nasional Kantor Wilayah Banten pada tahun 2024 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian untuk Bantuan Hukum Litigasi sebesar 238,57% dan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar 347,83% dengan rincian sebagai berikut:

Program Prioritas Nasional TA. 2024				
No	Program	Target RO	Realisasi	Capaian (%)
1	Bantuan Hukum Litigasi	197 Orang	470	238,57%
2	Bantuan Hukum Non Litigasi	23 Kegiatan	80	347,83%

3. INOVASI DAN PRESTASI

Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Banten telah mewujudkan inovasi-inovasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan publik. Inovasi yang dihasilkan tersebut merupakan prestasi bagi Kantor Wilayah Banten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis terkait Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Inovasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten diantaranya sebagai berikut:

INOVASI KANTOR WILAYAH BANTEN

JAWARA New Version



TEROBOSAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- ❖ Jawaara mengintegrasikan seluruh Pelayanan Hukum dan HAM yang dapat diakses kapan pun & dimanapun sehingga Masyarakat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi & pelayanan Hukum dan HAM
- ❖ Manfaat Aplikasi JAWARA menutup celah Korupsi, Pungli, dan Gratifikasi

M-HUKDIS



TEROBOSAN PEMBINAAN HUKUMAN DISIPLIN

M-Hukdis pada Aplikasi Sikap Jawaara merupakan media digitalisasi pelaksanaan Pembinaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sehingga evaluasi dan monitoring proses pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilakukan secara optimal

POSKO BANGKUMIS



TEROBOSAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM

Pos Konsultasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin/ tidak mampu merupakan program yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah Banten bersama Pemerintah Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum sehingga akses terhadap keadilan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

SIGUBOOK



TEROBOSAN PENCATATAN TAMU

- ❖ Mempermudah pengunjung dalam mengisi daftar tamu
- ❖ Mempermudah dalam pengumpulan dan penyortiran data pengunjung
- ❖ Membantu mengetahui jenis layanan yang sering dikunjungi

FACE SMART ACCESS LOCK



TEROBOSAN KEAMANAN AKSES PINTU MASUK

Kunci pintar otomatis berbasis sistem yang dapat merekam seseorang saat membuka atau mengunci pintu dengan deteksi wajah sehingga dapat meningkatkan keamanan dan berperan dalam monitoring disiplin pegawai serta sterilisasi ruangan dari pihak asing.

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ini sejalan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih di Lingkungan Kantor Wilayah Banten selama tahun 2024 diantaranya:

PRESTASI KANTOR WILAYAH BANTEN

1. Penghargaan dari KPPN Serang sebagai Terbaik Pertama Kategori IKPA Tahun 2023 pada DIPA Dijten Imigrasi dengan nilai 100 & Terbaik ketiga Kategori IKPA Tahun 2023 pada DIPA Dijten HAM dengan nilai 99,79
2. Penghargaan dari Bapenda Kab. Tangerang yaitu Pak Jaka Digital Award Kategori Mitra Strategis
3. Penghargaan dari BNNP Provinsi Banten sebagai Partisipasi Aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
4. Penghargaan dari Pemda Kab. Pandeglang atas Gerai Terbaik dengan Kategori Pengunjung dan Pelayanan Terbanyak pada Mall Pelayanan Publik Kab. Pandeglang.
5. Penghargaan dari BPSDM sebagai Insan Cerdas BPSDM Hukum dan HAM Kategori Unit Kerja Terbaik dalam Pemenuhan Hak Jam Pembelajaran dengan Metode Mandiri



6. Penghargaan dari BSK Kementerian Hukum sebagai Kantor Wilayah Terbaik pada Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024
7. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten atas Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dengan Nilai 94,33
8. Penghargaan dari Ditjen AHU sebagai Kantor Wilayah Terbaik 2 Kategori Persentase Pertumbuhan Pencapaian Target dan Realisasi PNBPN Tahun 2022 - 2024
9. Penghargaan dari Ditjen AHU sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam Kategori Nilai IKPA dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan Tahun 2024
10. Peringkat Pertama Satker dengan Capaian IKPA Pagu Sedang (15 M s.d 50M) lingkup Kanwil DJPb Provinsi Banten



11. Penghargaan dari Kementerian Hukum sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Baik pada Pembinaan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024
12. Penghargaan dari Kementerian Hukum sebagai Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Rutan Kelas IIB Serang
13. Penghargaan Peringkat II Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
14. Peringkat I Hasil Pengisian Arsip Vital Aplikasi e-Arsip di lingkungan Kantor Wilayah UPT Kecil Kementerian Hukum dan HAM
15. Peringkat I Hasil Pengisian Surat Keluar Aplikasi SRIKANDI Tingkat Kantor Wilayah UPT Kecil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



BAB IV

PENUTUP

Berisi kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten serta strategi rencana kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

PENGAYOMAN

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Wilayah. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator kinerja, realisasi anggaran dan kinerja anggaran, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada periode tahun 2024 Kantor Wilayah Banten mengemban 18 Sasaran kegiatan dengan 30 indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Untuk mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Banten mendapat alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 425.546.833.000,- pada 28 DIPA dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.
2. Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten bahwa 30 Indikator kinerja telah tercapai optimal dan melebihi target yang ditetapkan dengan persentase rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 125,54%. Kemudian dari sisi anggaran, realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada tahun 2024 telah mencapai 87,43% atau sejumlah Rp 372.062.480.336,- , dan nilai kinerja anggaran berdasarkan nilai perencanaan anggaran dan nilai IKPA yaitu tercapai sebesar 95,95.
3. Berdasarkan hasil pengukuran capaian dari indikator kinerja dan anggaran maka diketahui *performance* Kantor Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun 2024 mencapai 102,97% dengan persentase efisiensi sumber daya sebesar 38,10%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2024, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten secara keseluruhan sangatlah produktif.
4. Kemudian kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan AHU, Kekayaan Intelektual, dan Keimigrasian yaitu sebesar Rp 325.048.725.000,-.
5. Selanjutnya pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten telah menghasilkan banyak prestasi-prestasi terbaik. Hal ini yang tercermin dengan diraihnya sebanyak 15 penghargaan selama periode tahun 2024 ini.

SARAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Hukum dan HAM terbagi menjadi 4 Kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini diemban, juga turut terbagi berdasarkan wewenang dan *core bussiness* dari 4 Kementerian tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap seluruh indikator kinerja yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM, akan menjadi tanggungjawab dari masing-masing Kementerian tersebut. Oleh karena itu, hasil capaian indikator kinerja di tahun 2024 ini yang telah disusun dalam LKJIP tahun 2024, diharapkan dapat menjadi pemicu dalam terus meningkatkan kinerja pada 4 Kementerian tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil capaian kinerja yang telah diuraikan perlu disusun rencana tindak lanjut untuk periode mendatang sehingga seluruh kinerja Kantor Wilayah Banten dapat tercapai optimal dan melebihi target yang telah ditetapkan. Karenanya, hal-hal yang perlu menjadi atensi oleh seluruh jajaran dilingkungan Kantor Wilayah Banten diantaranya:

1. Fokus dalam implementasi dan peningkatan pembangunan Reformasi Birokrasi dengan berperan aktif memenuhi kebutuhan masyarakat dan adaptif dalam mengembangkan kemudahan layanan.
2. Melakukan efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak melibatkan dan berdampak langsung kepada masyarakat.
3. Dalam peningkatan layanan AHU di Wilayah, segera menyusun langkah-langkah percepatan yang secara efektif dapat menyelesaikan seluruh pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran jabatan notaris.
4. Terkait dengan blokir anggaran di tahun 2024 atas belanja modal pembangunan gedung Kantor Imigrasi Kls I Non TPI Serang, segera menyusun kembali kebutuhan anggaran belanja modal pembangunan gedung Kantor serta berkonsultasi dan melibatkan secara aktif Ditjen Imigrasi agar dapat segera ditindaklanjuti di tahun 2025.
5. Pada jajaran Pemasarakatan, dalam mengoptimalkan Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana/Anak Binaan, segera benahi dan lakukan pemenuhan perizinan penyelenggaraan pendidikan, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana, dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mendukung pemenuhan Hak Pendidikan

Narapidana/Anak Binaan.

6. Lakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara rutin dan berkala atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran dengan berorientasi hasil, dan berdampak.
7. Tingkatkan sinergitas dan kolaborasi secara intens dengan dengan aparat penegak hukum, forkopimda, Akademisi dan stakeholder guna mendukung pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.



LAMPIRAN

PENGAYOMAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

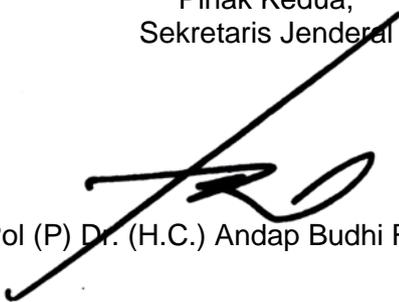
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	100 % 3,1 Indeks

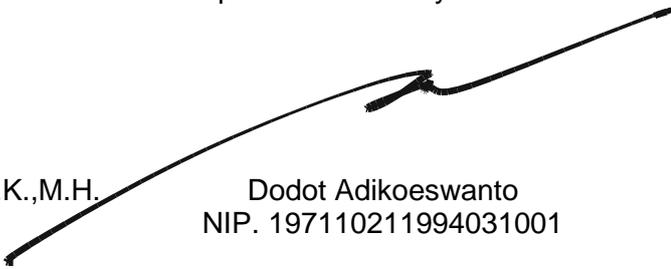
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 16.575.063.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 16.575.063.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K., M.H.


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

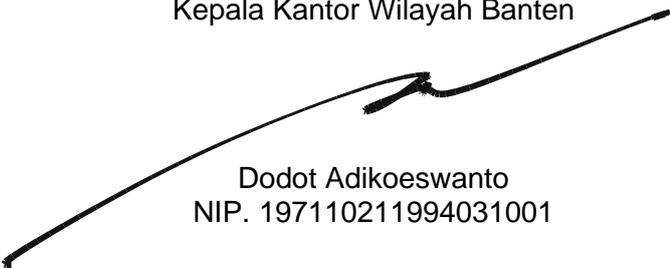
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

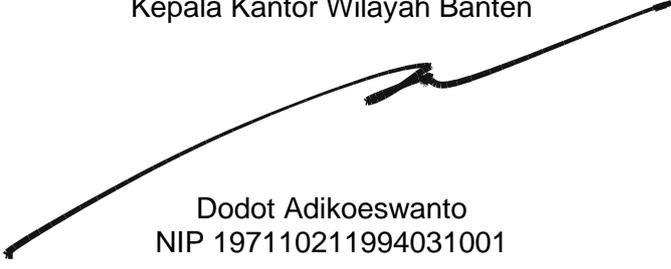
Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.838.178.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.838.178.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasaryakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

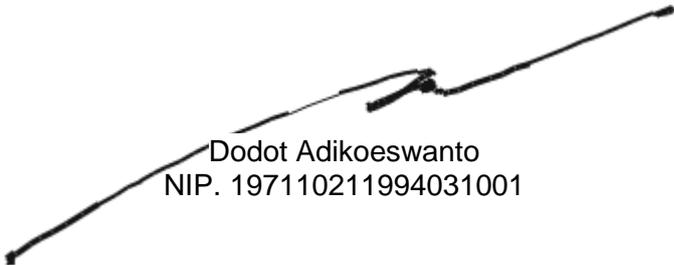
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasaryakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 98.831.580.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 98.831.580.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 175.028.889.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 175.028.889.000,-

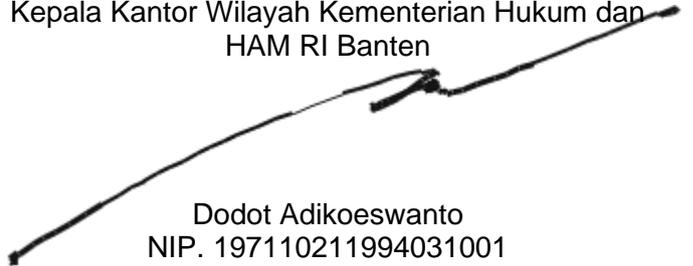
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Banten

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.931.557.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 7.931.557.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 80.510.494.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 80.510.494.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

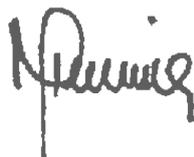
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.374.578.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.374.578.000,-

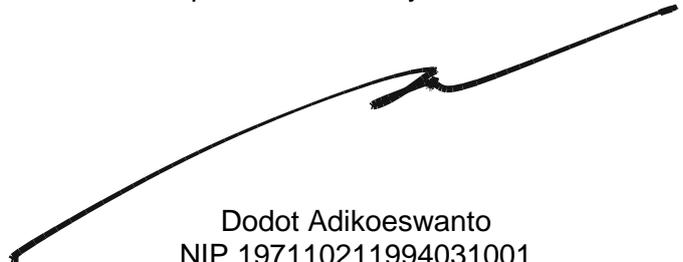
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Dodot Adikoewanto
NIP 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 498.635.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 498.635.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoewanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

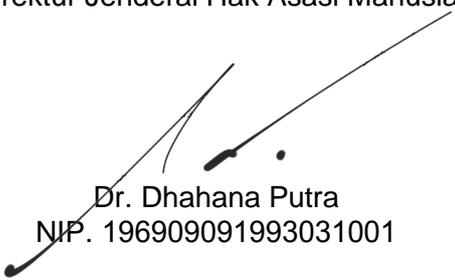
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

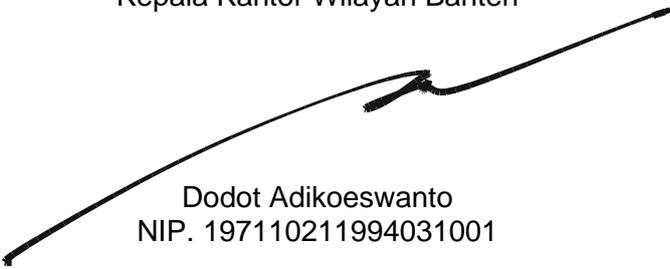
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

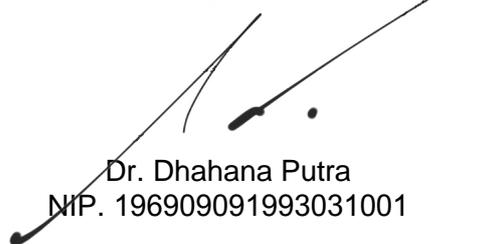
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 251.447.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 251.447.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

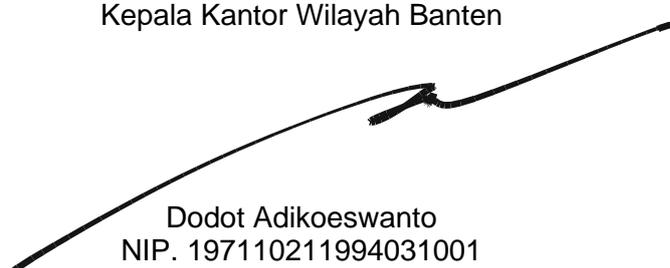
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

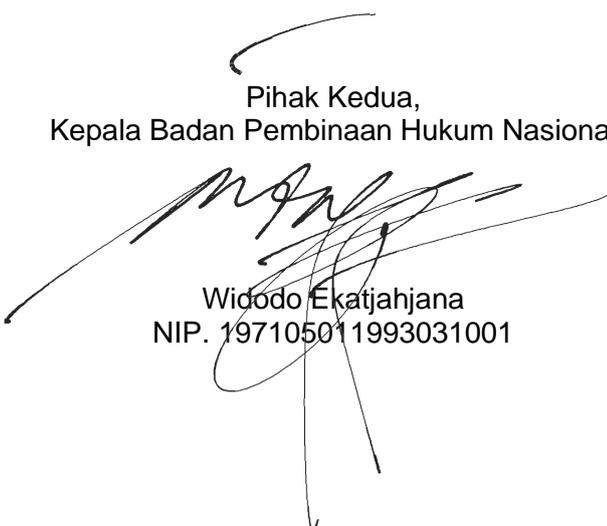
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

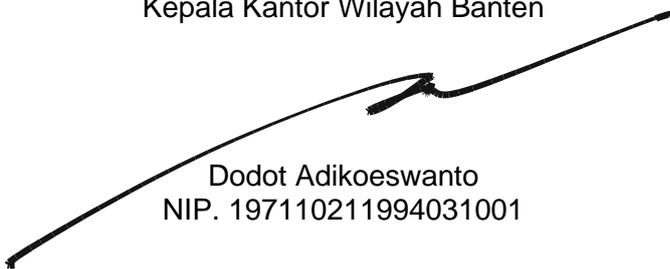
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 138.004.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 138.004.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.257.962.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 2.257.962.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 249.259.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 249.259.000,-

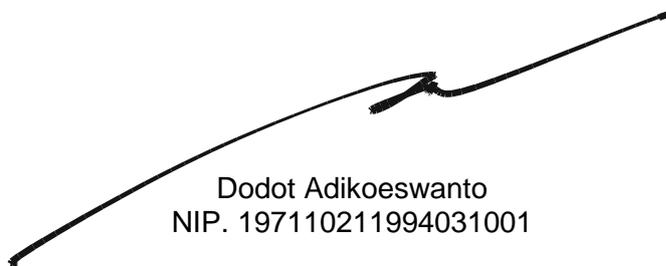
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

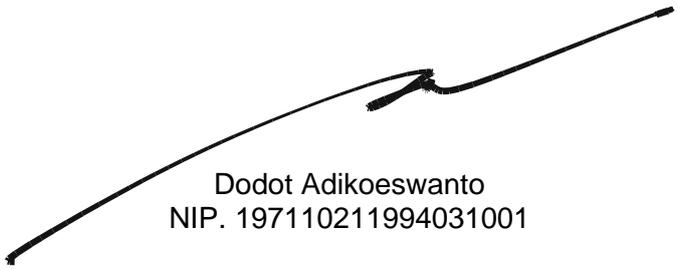
Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001